

“Pahlawan Tanpa Tanda Jasa,” Itu Telah Tiada

# FORWAS

Mengembangkan dan Memasyarakatkan Pengawasan



**MEMBANGUN WBK  
MELALUI PENDEKATAN KULTURAL**



## Laporan Utama

# MEMBANGUN WBK MELALUI PENDEKATAN KULTURAL

Selain pakem aturan yang kini menjadi instrumen pemerintah untuk menunjang pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), jajaran Inspektorat Jenderal Kemendikbud memperkaya khazanah WBK melalui pendekatan kultural. Hasil awal nampaknya berbuah manis dengan penerimaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk laporan keuangan 2014 sekaligus mengulang sukses tahun sebelumnya.

4



## MENDIKBUD DAN BPK BERI APRESIASI KEPADA ITJEN KEMENDIKBUD

Apresiasi tinggi kepada jajaran Inspektur Jenderal Kemendikbud yang dinilai berhasil membangun era baru dalam hal sinergitas tata kelola keuangan negara.

8

## KEMENDIKBUD BUTUH SINERGITAS PENGAWASAN

Kemendikbud membutuhkan sinergitas seluruh kekuatan sumber daya pengawasan untuk secara bersama membangun dunia pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dana pendidikan, demikian ujar Irjen Kemendikbud Daryanto.

12

## CUPLIKAN PERISTIWA

- 14 | Pelaksanaan UKG di SMKN 1 Denpasar Lancar
- 15 | Setuju UKG, Tapi Sertifikasi Jangan Dihapus
- 17 | Pelaksanaan UKG di Bali Lancar
- 18 | Irjen Hadiri Rapat Koordinasi Program Indonesia Pintar dengan Bank Penyalur
- 19 | Kemendikbud Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi
- 20 | Irjen Hadiri Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi
- 21 | Mendikbud: Peserta KKP Harus Berprestasi di Dalam dan Luar Kelas
- 22 | Irjen: Peserta KKP 2015 Cikal Bakal Pemimpin Masa Depan
- 22 | Jokowi : Agen KKP Harus Mampu Bangun Daerah Masing-Masing
- 23 | SMAN 1 Padang dan LPMP Sumbang Sasaran Irjen di Hari ke-3
- 24 | Inspektorat Investigasi Adakan Rapat Klinik/Fasilitasi Tinjut
- 25 | Itjen Adakan Rapat Tinjut Penandatanganan Piagam WBK

## ARTIKEL

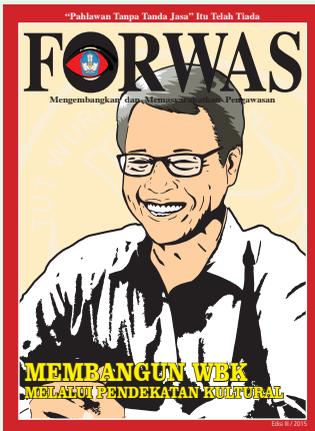
- 26 | Lima Kegiatan Untuk Mencapai Tata Kelola Yang Baik
- 29 | Akuntabilitas Tata Kelola dan Kinerja Sebagai Implementasi Manajemen Risiko Pengawasan Fungsional Pendidikan
- 36 | Evaluasi Pemetaan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)
- 41 | Nilai-Nilai Budaya Kerja Kemendikbud
- 45 | Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Komitmen Kuat Pencegahan Korupsi)
- 48 | Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual
- 55 | Strategi Tiga Lini/Lapisan Pertahanan

## PROFIL

- 60 | "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" Itu Telah Tiada
- 64 | Suyadi Pendekar Pengawasan Itjen Kemendikbud

## HALAMAN TERAKHIR

- 66 | "WATCHDOG...?"



## Cover Story

Tidak mudah untuk memilih ilustrasi visual hingga akhirnya terpilih menempati sebuah cover di majalah FORWAS. Dari berbagai alternatif yang diajukan dalam rapat redaksi, terdapat sebuah lukisan Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto yang memiliki pesan kuat sebagai sosok bersahaja membenahi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup kementerian.

Ilustrasi hasil kerja keras dari kru redaksi Rinaldy Hidayatullah dan Adhitya Nisfianto, seakan memberi pesan kepada kita semua orang bahwa figur inspektur jenderal tidak harus mencerminkan seorang pejabat tinggi yang harus ditakuti tetapi seorang sahabat yang siap untuk bersama-sama berniat, berpikir dan bertindak sesuatu yang terbaik bagi kejayaan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan.

Sosok seorang Daryanto sebagai pejabat baru Itjen Kemendikbud, diakui Mendikbud dan mitranya kepala BPKP telah “berlari,” kancang dalam menata organisasi pengawas internal sesuai visi “terwujudnya pengawasan yang berkualitas terhadap layanan pendidikan dan kebudayaan”. (emte)

## Dari Redaksi

Edisi terakhir majalah Forwas tahun 2015 ini, sengaja dipilih topik khusus seputar zona integritas Wilayah Bebas Korupsi di jajaran Inspektorat Jenderal Kemendikbud yang dirangkum dalam beberapa tulisan di halaman laporan utama serta sekitar Rapat Koordinasi Sinergitas Itjen Kemendikbud hingga melahirkan sebuah nota kesepahaman antara Mendikbud dan Kepala BPKP.

Sosok pencipta lagu hymne guru “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa,” yang beberapa hari lalu telah berpulang ke rakhmatullah, mendapat tempat khusus dalam edisi kali ini sebagai bentuk apresiasi Kemendikbud terhadap sang legenda itu. Jasad fisiknya boleh tiada namun warisannya terus membekas bagi seluruh insan pendidik dan para siswa seluruh Indonesia.

Seputar kegiatan inspektur jenderal dan pejabat Itjen lainnya, juga dinilai layak dipublikasi dengan maksud bahwa jajaran lembaga ini sedapat mungkin dekat dengan pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan tanah air.

Begitu pula hasil wawancara dengan Irjen Daryanto tentang pandangan yang bersangkutan melakukan pengawasan secara intensif namun tidak menghilangkan humanism melalui pendekatan kultural.

Dalam edisi ini, kami pilihkan beberapa artikel yang layak untuk dibaca guna memperkaya hasanah pengetahuan pembaca terutama dalam sisi pengawasan karena para penulis adalah pelaku profesional di bidang ini.

Salam dari redaksi





# MEMBANGUN WBK MELALUI PENDEKATAN KULTURAL

Selain pakem aturan yang kini menjadi instrumen pemerintah untuk menunjang pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), jajaran Inspektorat jenderal Kemendikbud memperkaya khazanah WBK melalui pendekatan kultural. Hasil awal nampaknya berbuah manis dengan penerimaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk laporan keuangan 2014 sekaligus mengulang sukses tahun sebelumnya.



Piagam Penghargaan dari BPK kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah berhasil sebagai pengelola keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut sejak 2013

Pepatah “banyak jalan menuju Roma,” nampaknya menjadi inspirasi bagi seorang Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto, dalam upaya menangkal tindak kejahatan korupsi. Ia tidak terlihat canggung ketika didaulat menjadi pembicara dalam acara wayangan atau sesekali melantunkan lagu dengan memetik gitar sebagai bagian dari eksploitasi kesenian dalam pendekatan kultural menuju WBK.

“Ikhtiar apa pun akan kami lakukan agar penyakit korupsi tidak menular di lingkungan dunia pendidikan,” tuturnya singkat, menyikapi tuduhan miring masyarakat yang dahulu kementerian ini sempat menjadi lima besar ranking kementerian terkorup.

Ketika berbicara ditengah perhelatan akbar Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kemendikbud beberapa waktu lalu, Daryanto mengemukakan bahwa Korupsi adalah bentuk kejahatan yang dikate-

gorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Karena itulah Kemendikbud melaksanakan banyak kegiatan yang luar biasa pula dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Setidaknya di jajaran Itjen Kemendikbud terdapat tiga hal dalam mendukung ikhtiar yang dimaksud, masing-masing pertama melakukan *Workshop* WBK secara intensif sejak tahun 2012 khususnya untuk memasyarakatkan Peraturan MenPAN no 60 tahun 2012 dan no 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona Integritas menuju WBK dengan 20 indikator proses dan 6 komponen pengungkit.

Kemudian yang kedua, Itjen Kemendikbud telah sepakat untuk melakukan upaya perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara di semua lini Kemendikbud, dan yang ketiga Kemendikbud membentuk Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur melalui melalui Keputusan

Mendikbud Nomor 72 Tahun 2012 yang kemudian diperkuat dengan Permendikbud nomor 51 Tahun 2013 tentang program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemendikbud, yang diikuti langkah pendirian unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas melaporkan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kemendikbud.

“Jajaran Kemendikbud sudah meneguhkan Komitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Zona Integritas menuju WBK itu,” ungkap Daryanto.

Ia bahkan tak mengenal lelah dalam membangun WBK di seluruh lini dunia pendidikan di Indonesia, bahkan sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke ujung tombak institusi pendidikan seperti yang dilakukannya terhadap tiga sekolah di Semarang masing-masing SMPN 6, SMAN 1, dan SMKN 7 Semarang dalam rangka kegiatan CSK (Cek Sekolah Ku) dengan menyertakan pihak lembaga *Transparency International*

Malam 1 Suro harus dijadikan sebagai renungan untuk membersihkan diri dan menahan hawa nafsu baik di dunia maupun akhirat. "Banyaknya persoalan seperti ekonomi dan Politik dapat mengikis budaya luhur bangsa Indonesia harus menjadi perhatian dan refleksi bagi semua pihak," tambah Daryanto



*Indonesia (TII).*

Kultur menghargai orang lain terasa kental dalam sidak tersebut, ketika Irjen menjalin diskusi mengenai pengelolaan CSK di sekolah yang dihadiri pejabat dan tokoh pendidik di Semarang sekaligus mengenyampingkan "rasa angker," seperti lazimnya kegiatan sidak yang cenderung menyingkap kesalahan dan adanya penyimpangan.

Apa yang dilakukan Irjen Kemendikbud tersebut, tidak lain adalah salah satu upaya sungguh-sungguh dalam memperbaiki citra kementerian di mata masyarakat Indonesia maupun masyarakat transparansi internasional.

Menurut laporan *Corruption Perceptions Index*, peringkat Indonesia di indeks korupsi yang dikeluarkan *Transparency International* akhir 2014 lalu naik dari 114 ke 107 namun masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, 'Malaysia' dan Singapura.

Organisasi antikorupsi ini setiap tahun mengeluarkan laporan korupsi global. Dari 28 negara di kawasan Asia Pasifik, sebagian besarnya mendapat peringkat yang buruk. 18 negara mendapat skor di bawah 40 dari seluruhnya 100 skor. 0 berarti terkorup dan 100 berarti paling bersih.

Indonesia mendapat skor 34,

naik dari tahun lalu, 32. Indonesia kini menduduki peringkat 107, bersama-sama dengan Argentina dan Djibouti. Tahun 2014, Indonesia berada di peringkat 114 dari seluruhnya 174 negara yang diperiksa.

Upaya mewujudkan WBK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ternyata membuahkan hasil berupa diraihnya kembali penghargaan laporan keuangan tahun 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta atas dasar keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

"Ini momen yang bagus bagi seluruh jajaran Kemendikbud untuk semakin meningkatkan

**“ Korupsi adalah bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Karena itulah Kemendikbud melaksanakan banyak kegiatan yang luar biasa pula dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. ”**



Irjen Daryanto menyempatkan diri berdialog dengan Ki Mantep Soedarsono sebelum pergelaran wayang kulit di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta

kinerja menjadi lebih baik,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi.

Penghargaan tersebut nantinya akan ditaruh di tiap-tiap Satuan Kerja (Satker) Utama Kemendikbud

guna membangun semangat dalam meningkatkan kinerja yang baik. (Miskudin Taufik)■

## Kesenian Wayang Kulit

Kultur Indonesia terkait kental dengan beragam kesenian termasuk kesenian wayang yang selama ini terbukti ampuh sebagai instrumen menularkan keteladanan kepada semua lapisan. Berbagai pesan positif ternyata efektif melalui pergelaran kesenian yang satu ini, tidak terkecuali untuk mengajak semua pihak untuk menghindari tindakan buruk berupa kejahatan korupsi.

**Wayang kulit** adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata ‘Ma Hyang’ yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna ‘bayangan’, hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Dalang

memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih, sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik atau lampu minyak (blencong) sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Untuk dapat memahami cerita wayang (lakon), penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar.

Secara umum wayang mengambil cerita dari naskah Mahabharata dan Ramayana, tetapi tak dibatasi hanya dengan pakem (standar) tersebut, ki dalang bisa juga memainkan lakon carangan (gubahan). Beberapa cerita diambil dari cerita Panji.

Pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003, sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga (*Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*).■

# Mendikbud dan BPKP Beri Apresiasi Kepada Itjen Kemendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, secara bersamaan bagaikan gayung bersambut memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Inspektorat Jenderal Kemendikbud yang dinilai berhasil membangun era baru dalam hal sinergitas tata kelola keuangan negara.

**I**ni dikemukakan menteri dan kepala BPKP, usai menandatangani nota kesepahaman tentang penguatan tata pemerintahan yang baik di Yogyakarta sebagai puncak dari kegiatan rapat koordinasi sinergitas pengawasan anggaran fungsi pendidikan pekan lalu.

“Irjen yang baru bapak Daryanto dalam rentang waktu relatif singkat sudah mampu melak-

sanakan tugas dan fungsinya dengan sukses tanpa harus ditakuti,” kata menteri tegas, seraya meminta agar MoU tersebut segera dibuat rencana aksi sebagai panduan semua pihak.

Sementara Kepala BPKP, Ardan Adiperdana menyebut apa yang dilakukan jajaran Itjen Kemendikbud memfasilitasi terciptanya kerjasama tersebut, tidak hanya yang pertama kali terjadi tetapi juga akan menjadi model bagi BPKP

untuk menjalin kerjasama serupa dengan seluruh kementerian.

“Kami melihat peran pak Daryanto turut mewarnai jalannya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pendidikan,” ungkap Ardan, mencermati upaya sinergitas yang baru pertama kali dilakukan dalam menyamakan pandangan terhadap hasil temuan yang tadinya berbeda antara kedua instansi. (Miskudin Taufik) ■



Mendikbud Anies Baswedan dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana menandatangani MOU antara kedua lembaga tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Turut menyaksikan Irjen Kemendikbud Daryanto. (foto/emte)



Dialog antar peserta Rakor Sinergitas Pengawasan Anggaran Fungsi Pendidikan Itjen Kemendukbud dengan narasumber Deputy BPKP Binsar H. Simanjuntak dan Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Yusuf Ateh dan dipandu Staf Ahli Mendikbud Chatarina Muliana Girsang dan Irjen Daryanto (foto/reza)

## KOMITMEN ITU BERMULA DARI YOGYA

Perhelatan akbar malam itu terkesan meriah di Yogyakarta. Bukan lantaran para pendekar pengawasan seluruh Indonesia berkumpul akrab bersama Mendikbud Anies Baswedan dan Kepala BPKP, Ardan Adiperdana tetapi sepotong sejarah baru menegaskan komitmen secara monumental yang terbangun melalui kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak yang belum pernah dilakukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah mana pun sebelumnya.

Kesepakatan yang tertuang dalam MoU itu, ditandatangani oleh Mendikbud dan Kepala BPKP dalam bentuk nota kesepahaman tentang penguatan tata pemerintahan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menunjang tata kelola keuangan negara lebih baik.

Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto menyebut perhelatan tersebut adalah sesuatu kegiatan langka yang mana 34 kepala perwakilan BPKP di Indonesia 100 % hadir begitu pula kepala inspektorat provinsi seluruh Indonesia.

Para pendekar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) datang dengan membawa materi temuan dari daerah masing-masing, kemudian saling bertukar informasi dan bertukar angka temuan hingga akhirnya saling memverifikasi untuk dijadikan acuan bersama.

“Suasannya mirip adu dokumen temuan antar pemeriksa dari BPKP dengan Itjen Kemendikbud,” kata Irjen Daryanto dengan menyebut bahwa tugas awal para pejabat APIP tersebut adalah menindaklanjuti temuan Rp 270

## Laporan Utama

Milyar dan 60 persen di antaranya sudah berhasil diverifikasi bersama untuk ditindaklanjuti kemudian. Perbedaan angka hasil temuan dari dua lembaga pemeriksaan tersebut nantinya akan dijadikan satu dokumen temuan untuk kemudian ditindaklanjuti menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Ini tidak mudah tetapi cukup fenomenal karena *outstanding* temuan harus ditutup dengan kekuatan dokumen yang valid,” tutur kepala BPKP, Ardan Adiperdana.

Ia mengakui, BPKP sendiri menemui kesulitan untuk menutup hasil temuan tanpa dokumen

pendukung yang sah. Jika menutup temuan tanpa dukungan alat bukti begitu saja, nantinya akan memantik masalah baru atau setidaknya mengundang kecurigaan hingga akan berakhir ke KPK.

“Ini nantinya akan jadi model bagi BPKP untuk menjalin kerjasama serupa dengan kementerian



dan lembaga pemerintah lainnya agar segala bentuk temuan benar-benar mencerminkan transparansi dan akuntabel,” kata Ardan dengan menyebut bahwa inovasi yang dilakukan Itjen Kemendikbud tersebut membuahkan hasil nyata ketika BPK telah menganugerahkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dua tahun berturut turut dalam hal tata kelola keuangan negara.

Dalam perhelatan itu, BPKP memberikan apresiasi kepada jajaran Itjen Kemendikbud, khususnya dalam upaya berkesimbangan mencanangkan zona integritas di lingkungan Kemendikbud.

Ikhtiar tersebut dinilai penting dalam memberikan kontribusi nyata melakukan pembangunan di bidang pendidikan berkualitas selain sebuah tindakan nyata mengamankan aset negara setelah adanya pemisahan direktorat pendidikan tinggi ke kementerian Ristek. (Miskudin Taufik)■





# IRJEN KEMENDIKBUD: CEGAH KORUPSI JADI PILIHAN UTAMA

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Daryanto, menegaskan bahwa untuk memperkecil terjadinya penyimpangan tindak kejahatan korupsi, pihaknya lebih mengutamakan upaya pencegahan dari hulu dibanding upaya penindakan dalam tata kelola keuangan negara.

## KEMENDIKBUD BUTUH SINERGITAS PENGAWASAN

**K**emendikbud membutuhkan sinergitas seluruh kekuatan sumber daya pengawasan untuk secara bersama membangun dunia pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dana pendidikan, demikian Irjen Kemendikbud Daryanto.

Berbicara di hadapan peserta rapat kordinasi di Yogyakarta Kamis malam yang dihadiri oleh kepala perwakilan BPKP di seluruh Indonesia, pejabat tinggi Kemendikbud, dan deputi kementerian PANRB dan BPKP, Irjen Kemendikbud Daryanto mengemukakan bahwa Kemendikbud terus memperbaiki kinerja termasuk kinerja dalam hal tata kelola keuangan.

Buah dari kerja keras tersebut,

antara lain diterimanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam dua tahun berturut turut sejak tahun anggaran 2014 serta perbaikan kinerja reformasi birokrasi dengan peringkat tiga besar terbaik dari 22 kementerian yang dinilai Kementerian PAN dan RB.

Bagi jajaran Inspektorat Jenderal Kemendikbud, sinergitas pengawasan secara terpadu dengan lembaga pengawasan lainnya akan bernilai penting untuk mengantar sistem pendidikan yang lebih baik.

Daryanto meluruskan adanya asumsi publik yang seolah-olah terjadinya penyimpangan dana pendidikan selalu ditumpukan kepada Kemendikbud, padahal alokasi dana pendidikan yang besar

tersebut didistribusikan kepada daerah, kementerian dan lembaga. Dari sekitar Rp 400 Triliun alokasi dana pendidikan nasional, Rp 250 Triliun disalurkan ke daerah sementara Rp 50 Triliun di antaranya dikelola Kemendikbud, Rp 41 Triliun Kementerian Agama, Rp 42 Triliun Kementerian Ristek dan sisanya untuk 16 kementerian lainnya.

Dengan sinergitas tersebut, setidaknya penyimpangan dana untuk pembangunan pendidikan nasional dapat dihapuskan hingga tujuan nasional di bidang pendidikan dapat tercapai.

Rapat kordinasi berlangsung tiga hari sejak Kamis, diikuti seluruh kepala perwakilan BPKP di Indonesia, inspektorat provinsi dan delegasi Kementerian Dalam

“**C**ost pencegahan jauh lebih murah sekaligus lebih efektif dalam membangun peradaban baru dunia pendidikan yang bersih,” kata Irjen Daryanto di sela kegiatan Rapat Koordinasi “Sinergitas Pengawasan Anggaran Fungsi Pendidikan Itjen Kemendikbud,” di Yogyakarta, Kamis.

Upaya pencegahan tersebut, dilakukan secara sistemik melalui pendekatan kultural dari lapis individu terlebih dahulu kemudian meluas ke tingkat komunitas formal dengan alasan bahwa kementerian

Dikbud adalah kelompok sumber daya manusia yang berpendidikan dan berkebudayaan.

Pilihan tersebut tidak berarti mengenyampingkan upaya penindakan yang relatif menguras energi aparat penegak hukum dan alokasi dana yang tidak sedikit dari negara untuk menuntaskan proses peradilan, tanpa jaminan uang negara yang dikorupsi tersebut dikembalikan utuh kepada negara.

“Menanamkan rasa malu itu jauh lebih penting dibanding menghukum,” tegas Daryanto dengan menyebut strategi pencegahan melalui penanaman rasa malu ter-

lebih dahulu kemudian pendekatan peringatan melalui nasihat.

Jika belum juga memberi dampak positif baru dilakukan tindakan pelaporan dan terakhir pendekatan sanksi pidana.

Rapat koordinasi berlangsung tiga hari sejak hari Kamis, kerjasama antara Itjen Kemendikbud dengan BPKP, Kemendagri dan Inspektorat provinsi seluruh Indonesia.

Perhelatan akbar yang direncanakan bakal dihadiri Mendikbud dan Menpan RB itu, akan membuahakan kesepakatan dalam bentuk MoU antara Kemendikbud dan BPKP. (Miskudin Taufik)■

Negeri dan Kementerian PAN dan RB serta pejabat tinggi di lingkungan Kemendikbud.

### **KEMENDIKBUD dan BPKP Beri Apresiasi Kepada Itjen Kemendikbud**

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Inspektorat Jenderal Kemendikbud yang dinilai berhasil membangun era baru dalam hal sinergitas tata kelola keuangan negara.

Ini dikemukakan menteri dan kepala BPKP, usai menandatangani nota kesepahaman tentang penguatan tata pemerintahan yang baik di Yogyakarta sebagai puncak dari kegiatan rapat koordinasi sinergitas pengawasan anggaran fungsi pendidikan, Jumat

malam.

“Irjen yang baru bapak Daryanto dalam rentang waktu relatif singkat sudah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sukses tanpa harus ditakuti,” kata menteri tegas, seraya meminta agar MoU tersebut segera dibuat rencana aksi sebagai panduan semua pihak.

Sementara Kepala BPKP, Ardan Adiperdana menyebut apa yang dilakukan jajaran Itjen Kemendikbud yang memfasilitasi terciptanya kerjasama tersebut,

tidak hanya yang pertama kali terjadi tetapi juga akan menjadi model bagi BPKP untuk menjalin kerjasama serupa dengan seluruh kementerian.

“Kami melihat peran pak Daryanto turut mewarnai jalannya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pendidikan,” ungkap Ardan, mencermati upaya sinergitas yang baru pertama kali dilakukan dalam menyamakan pandangan terhadap hasil temuan yang tadinya berbeda antara kedua instansi. (Miskudin Taufik) ■

“**Kemendikbud membutuhkan sinergitas seluruh kekuatan sumber daya pengawasan untuk secara bersama membangun dunia pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dana pendidikan**”

# Pelaksanaan UKG di SMKN 1 Denpasar Lancar

Sebagai salah satu tempat uji kompetensi (TUK) di Provinsi Bali, SMKN 1 Denpasar menggunakan tiga ruangan lab komputer sebagai tempat ujian.

Sudiase selaku perwakilan LPMP yang bertindak sebagai pengawas mengatakan bahwa pelaksanaan uji kompetensi guru di SMKN 1 berlangsung tanpa hambatan. “Tidak ada keluhan dari guru, tidak ada kendala listrik,” ujarnya.

Hal yang menjadi perhatian bagi dirinya adalah adanya satu dua guru dalam setiap sesi yang tidak hadir mengikuti ujian. Ia menduga guru tersebut tidak hadir karena guru tersebut sudah memasuki masa pensiun atau alih tugas ke tempat lain. “Ada satu dua kasus salah mata pelajaran tapi sudah dijadwalkan susulan,” tambahnya.

Sementara itu, Wayan



UKG di SMKN 1 Denpasar, Kamis (19/11)

Swantika selaku operator di SMKN 1 mengatakan sedikit kendala adalah mengenai pengoperasian, banyak guru yang sudah berumur kesulitan dalam menggerakkan tetikus (*mouse*) dan melakukan *scrolling*. Oleh karenanya, ia selalu siap siaga berjaga di ruang ujian.

Adapun peserta UKG yang ikut dalam sesi ke-2, Anak Agung

Oka Swardana (guru SMP PGRI 5 Denpasar) mengatakan tidak ada kendala dalam UKG kali ini, bahkan ia merasa kelebihan waktu dalam mengerjakan soal sehingga dapat keluar lebih awal dari peserta lainnya.

Pelaksanaan UKG di SMKN 1 akan diikuti 2.338 guru dan berlangsung hingga Senin mendatang (23/11).■

## Ini Masukan Guru di Bali Soal UKG

Pelaksanaan UKG di Bali masih berlangsung hingga 23 November nanti. Sejumlah guru yang selesai melaksanakan ujian tidak luput memberi masukan kepada Kemendikbud agar dapat menyempurnakan lagi pelaksanaan UKG di masa mendatang.

Ni Putu Manik Sari misalnya, ditemui di SMKN 4 Bali seusai sesi pertama, Kamis

(19/11) mengatakan, sebagai guru kelas I SD soal-soal UKG yang diberikan kebanyakan adalah materi kelas II dan III. Ini sebagai imbas penyamarataan soal yang diberikan untuk guru kelas I sampai kelas III menggunakan paket soal guru kelas rendah, sedangkan guru kelas IV sampai kelas VI menggunakan soal paket guru kelas tinggi.

“Kebanyakan soalnya ma-

teri kelas II dan III, harapan saya untuk tahun ke depan dibuat per kelas saja,” ujarnya. Kendati demikian, Ni Putu berhasil meraih nilai 68 dalam UKG kali ini.

Hal sama juga diungkapkan Guru Kimia SMA Saraswati, Wayan yang mengatakan soal-soal Kimia yang diberikan kepadanya adalah materi kelas I dan II SMA, padahal ia mengajar kelas III.

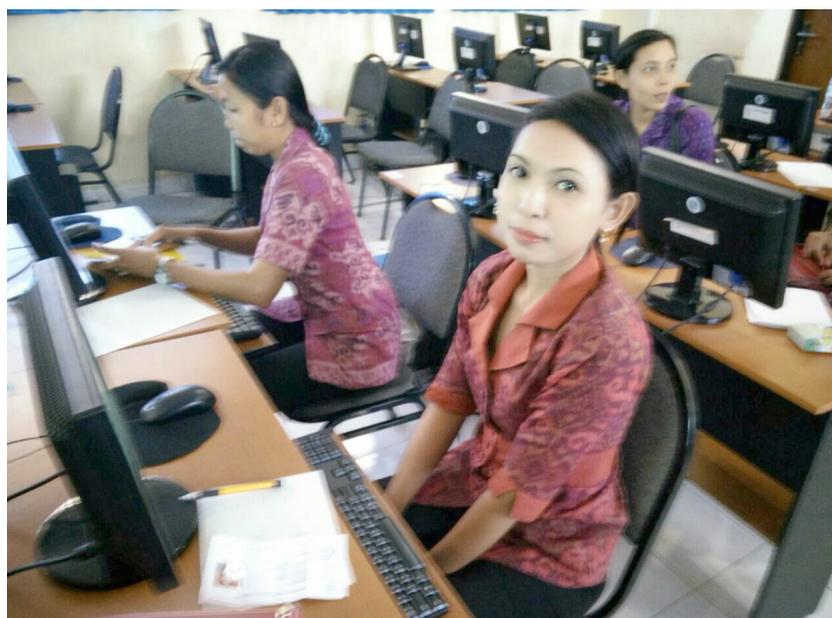
“Saya sekarang mengajar di kelas III, materi kelas I dan II yang lebih prinsip sudah banyak yang menguasai,” ujarnya.

Wayan sendiri menyadari bahwa sebagai guru mata pelajaran, ia harus mengetahui semua materi Kimia di semua tingkatan kelas, namun tetap saja ia berharap agar soal yang diberikan dibuat per kelas.

Wayan juga menambahkan, waktu ujian yang diberikan kurang karena banyak soal hitungan.

“Untuk ke depan mungkin bisa dibedakan waktu untuk soal eksakta, dan soal kelompok sosial. Kami hanya diberi waktu 2 menit per soal. Padahal, ada banyak hitungan yang rumit seperti menghitung pH dan redoks,” jelasnya.

Itu pula yang dikeluhkan rekan-rekannya sesama guru eksakta di sekolahnya yang mengaku tidak sempat me-



Ni Putu Manik Sari, peserta UKG di SMKN 4 Bali

review soal yang sudah dikerjakan karena kehabisan waktu.

Hal berbeda dikatakan Sri Wijiyani, guru SDN 9 Padang Sambian. Ditemui se usai melaksanakan UKG di SMKN 1 Denpasar, ia mengatakan ada jenis

soal yang tidak sesuai. “Untuk SD ada soal-soal Kimia dan Fisikanya yang menurut saya tidak sesuai, lebih ke materi SMP. Untuk soal Matematika sudah sesuai,” ujar Sri. ■

## Setuju UKG, Tapi Sertifikasi Jangan Dihapus

“Saya setuju UKG, walaupun harus Diklat, tidak apa-apa yang penting sertifikasi jangan distop,” ujar Mariani, salah seorang peserta UKG sesi ke-2 di SMKN 4 Denpasar, Kamis (19/11).

Sejumlah guru tampak sudah hadir satu jam sebelum pelaksanaan sesi kedua UKG di SMKN 4 Bali, mereka tampak antusias mengikuti UKG sambil membawa berbagai berkas seperti kisi-kisi dan ringkasan materi. Mariani mengatakan, ia sudah memper-

siapkan diri melalui latihan soal-soal UKG melalui Internet yang dijawab bersama teman-temannya. “Biasanya soal-soal dari Internet dicetak dan dibahas bersama,” tambahnya.

Kendati demikian, dari sejumlah pengalaman rekan-rekannya yang sudah mengikuti UKG mengatakan soal-soal yang diberikan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, itulah yang membuat Mariani khawatir.



Mariani, peserta UKG di SMKN 2 Denpasar

## Cuplikan Peristiwa

“Kalau ndak lulus ini katanya sertifikasinya di-stop, makanya temen-temen saya juga kepikiran, anak-anak juga jadi terlantar karena guru sibuk mencari bahan ke sana ke mari,” ungkap Mariani.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Daryanto ketika melakukan inspeksi di Padang menegaskan bahwa UKG tidak sama sekali mempengaruhi tunjangan sertifikasi. Kegunaan UKG adalah untuk

pemetaan dan peningkatan kompetensi guru di masa mendatang.

UKG tahun ini adalah yang kedua kalinya bagi Mariani. Ia mengikuti UKG tiga tahun silam.■

## 27 Guru Absen UKG di SMKN 4 Denpasar

Untuk pelaksanaan hari ini 19 November 2015, pada sesi pertama terlihat hanya satu peserta yang tidak hadir. Belum diketahui alasan ketidakhadiran peserta.

Menurut pengawas LPMP Ni Wayan Korti menyampaikan sejak hari pertama pelaksanaan, hingga sesi pertama hari ini, 27 orang

absen dan belum diketahui alasan ketidakhadirannya, sedangkan kasus salah mata pelajaran terhitung sebanyak 7 kali dan akan dijadwalkan UKG susulan.

Adapun kendala lain adalah adanya satu orang peserta yang tidak bisa mengikuti menjawab survey UKG sebanyak 20 soal. “Di layar komputer peserta tertulis

tidak ada jadwal ujian, mungkin gara-gara waktunya sudah lewat sehingga sudah ditutup dari pusat,” tambahnya.

Pelaksanaan UKG di SMKN 4 terpusat di satu ruangan ujian dan dibagi ke dalam tiga sesi per hari, yaitu jam 09.00-11.00, 12.00-14.00, dan 15.30-17.30.■



Pelaksanaan UKG di SMKN 4 Denpasar, Bali berlangsung 9-23 November 2015, diikuti 752 peserta dengan sistem daring (*online*).

## Pelaksanaan UKG di Bali Lancar



“Pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) saya laporkan berjalan lancar, tidak ada permasalahan signifikan, masalah kecil seperti mati listrik, dan salah mapel dapat diatasi,” ujar Kepala LPMP

Provinsi Bali I Made Alit Ariana ketika dikunjungi tim pemantau UKG Inspektorat Jenderal, Kamis (19/11).

I Made mengatakan adapun sejumlah masalah kecil seperti mati listrik, salah mata pelajaran

(mapel) dapat diatasi dengan baik. Untuk mati listrik paling tidak lama hanya sekitar 2 jam, dan dapat diteruskan di hari itu juga.

Fitur aplikasi yang menyimpan jawaban peserta setiap lima menit memudahkan peserta menjawab kembali soal jika listrik mati sehingga tidak perlu mengulanginya dari awal. Untuk masalah salah mata pelajaran, biasanya diganti di sisa hari tersisa atau menggunakan waktu UKG susulan.

UKG di provinsi Bali diikuti 43.672 guru dan tenaga kependidikan, dengan total 31.491 peserta hingga kemarin (18/11) telah selesai melaksanakan ujian. Sementara itu, 4.000 peserta dijadwalkan mengikuti UKG susulan karena berbagai hal. ■

## Inspektorat II Adakan Rapat *Expose* Audit Dana Dekonsentrasi

Inspektorat Wilayah II Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan rapat *expose* audit dana dekonsentrasi frekuensi I di ruang sidang lantai 6, gedung B, Itjen Kemendikbud pada Kamis (19/11). Rapat dihadiri oleh semua auditor wilayah II sebanyak 100 orang. Acara yang akan diadakan selama dua hari sampai besok (20/11) ini dibuka oleh Inspektur II, Maralus Panggabean. ■



## Irjen Hadiri Rapat Koordinasi Program Indonesia Pintar dengan Bank Penyalur

Kemendikbud melalui Direktorat Pendidikan Dasar Menengah dan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan rapat koordinasi program Indonesia Pintar dengan bank penyalur yang dilaksanakan di Hotel Grand Whiz, Kelapa Gading pada Kamis (19/11) pagi.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit utama Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan. Dalam acara tersebut Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad, mengatakan bahwa persyaratan pencairan akan dikaji kembali untuk mempermudah pencairan kolektifnya.

Kemudian, kondisional untuk pencairan kolektif dapat lebih diperluas sehingga dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Selain itu, sebaiknya sekolah menelusuri siswa yang

belum melakukan pencairan agar dapat melakukan pencairan dana tersebut.

Irjen Kemendikbud, Daryanto, menambahkan bahwa Inspektorat akan berkonsentrasi berapa dana yang dicairkan dan mengawal pencairan dana tersebut. Irjen juga menekankan bahwa yang paling penting adalah akuntabilitas dana atau uang yang diserahkan kepada siswa tersebut ■



(kiri ke kanan) Perwakilan Bank, Irjen Daryanto, dan Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad



## Kemendikbud Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi

Sebagai wujud memberikan apresiasi terhadap prestasi dan dedikasi guru dan tenaga kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional, yang dibuka secara langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu (18/11).

Penyelenggaraan kegiatan/lomba dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 21 November 2015, dengan

mengangkat tema “Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi yang Profesional dan Bermartabat Siap Membumilandakan Revolusi Mental Bagi Peserta Didik dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045”.

“Tema tersebut sangat relevan dengan semangat pendidik dewasa ini dalam konteks peningkatan mutu pendidikan nasional untuk menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan berdaya saing,” demikian disampaikan Mendikbud dalam sambutannya.

Pemilihan GTK Berprestasi merupakan wahana untuk

menuangkan ide, gagasan, dan mencari pemecahan isu atau permasalahan strategis tentang pendidikan, dengan melibatkan 1036 orang peserta yang terdiri dari 703 guru/tutor, 200 kepala sekolah, 133 pengawas, dan 21 Widyaiswara dari jenjang TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

Proses seleksi dilakukan secara berjenjang dimulai pada bulan April dari tingkat satuan pendidikan, kemudian tingkat kecamatan, dan kabupaten/kota, serta provinsi.

Setelah melalui jenjang tersebut, pada bulan November

## Cuplikan Peristiwa

proses seleksi masuk pada jenjang nasional.

Jenis kegiatan/lomba penilaian terdiri dari Guru TK, Kepala TK, Guru SD, Kepala SD, Pengawas SD, Tutor Paket A, Inovasi Pembelajaran tingkat SD, Lomba Kreativitas Guru SD, Guru SMP, Kepala SMP, Pengawas SMP, Tutor Paket B, Inovasi Pembelajaran tingkat SMP, Kreativitas Guru SMP, Satyalancana Pendidikan, Guru SDLB dan SMPLB, Kepala

SDLB dan SMPLB, Pengawas PLB, Guru Daerah Khusus.

Selanjutnya pada jenjang SMA terdiri dari Guru SMA, Kepala SMA, Pengawas SMA, Tutor Paket C, Guru SMK, Kepala SMK, Pengawas SMK, Guru SMA LB melalui kreativitas pembelajaran Guru PKLK Pendidikan Menengah, Kepala SMALB, dan Guru Dikmen Berdedikasi. Kemudian juga terdapat penilaian untuk Widyaiswara.

Mendikbud berharap penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi ini dapat menjadi semangat untuk terus membangun peradaban bangsa Indonesia dalam mewujudkan bangsa yang berbudaya, cerdas, bermutu dan berkarakter, dan mampu bersaing dalam pergaulan internasional.■



## Irjen Hadiri Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi

**I**nspetkur Jenderal Kemendikbud Daryanto menghadiri acara Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan

Berdedikasi pada Rabu (18/11) malam.

Acara yang diselenggarakan di hotel Graha Sahid Jakarta ini

dihadiri oleh guru dan tenaga pendidikan yang mewakili semua provinsi di Indonesia.■



## Mendikbud:

# Peserta KKP Harus Berprestasi di Dalam dan Luar Kelas

**M**endikbud Anies Baswedan bersilaturahmi dengan peserta kawah kepemimpinan pelajar (KKP) 2015 di Aula Insan Berprestasi Gedung A Kemendikbud, Rabu (18/11).

Di sela-sela silaturahmi tersebut Anies Baswedan memberikan saran kepada seluruh peserta KKP 2015, Anies mengatakan bahwa menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah karena penuh resiko dan bertanggung jawab terhadap semua yang dipimpinnya, setiap pemimpin itu harus ditempa dengan matang, dengan menghadapi berbagai persoalan yang ada agar mampu menjadi pemimpin yang kuat dan berkarakter.

Para peserta harus memiliki harapan dan keyakinan bahwa beban menjadi pemimpin harus dijadikan motivasi dan bukanlah beban.

Mendikbud meminta agar peserta harus berprestasi, baik

di dalam kelas maupun luar kelas. Jangan pernah takut dengan kegiatan yang banyak karena ke depan kita membutuhkan orang-orang yang memiliki banyak peran dan mampu memainkan berbagai macam peran terutama dalam dunia pendidikan dan kebudayaan.

“Seorang pemimpin akan

disebut pemimpin ketika ada orang yang mau dipimpin dan menjadi pemimpin muda adalah orang yang kepemimpinannya diakui oleh sebayanya karena mereka menganggap Anda berkompeten, berintegritas, dan mau dekat dengan yang dipimpin,” ujar Mendikbud di hadapan peserta KKP 2015. ■



**Irjen:**

# Peserta KKP 2015 Cikal Bakal Pemimpin Masa Depan

**S**alam hangat disampaikan Irjen Kemendikbud Daryanto kepada para peserta kawah kepemimpinan pelajar (KKP) 2015 di gedung A Kemendikbud, ketika melakukan silaturahmi dengan peserta, Rabu (18/11).

Daryanto merasa bangga kepada seluruh peserta KKP 2015 yang merupakan cikal bakal para pemimpin di masa yang akan datang. "Harapan Indonesia menjadi lebih baik dari mereka akan dituai di masa yang akan datang," ujar Daryanto.

Dalam acara itu, Daryanto juga menyempatkan diri berfoto bersama para peserta KKP 2015. ■



Irjen bersama beberapa peserta KKP 2015

**Jokowi :**

# Agen KKP Harus Mampu Bangun Daerah Masing-Masing

**A**cara yang turut dihadiri Mendikbud Anies Baswedan ini, diikuti 1.176 pelajar SMP, SMA, dan SMK yang merupakan pengurus OSIS dari perwakilan sekolah di tanah air.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan bahwa KKP sebagai wahana mewujudkan agenda prioritas pembangunan Nawacita yang kedelapan,



yaitu program pengembangan kepemimpinan pelajar secara nasional, guna membekali pemimpin muda masa kini dan mengembangkan potensi kepemimpinannya untuk masa mendatang.

”Kegiatan ini merupakan sarana untuk menyiapkan peserta sebagai pemimpin penggerak perubahan yang berkarakter dan patriotik dalam membangun daerahnya masing-masing,” ujar Jokowi.

Berbagai materi akan dibagikan kepada peserta seperti kewirausahaan, teknologi informasi (IT), komunikasi, program anti korupsi dari komisi pember-



Presiden RI Joko Widodo membuka acara kawah kepemimpinan pelajar (KKP) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).

rantasan korupsi (KPK), hingga materi anti narkoba dari badan narkotika nasional (BNN).

KKP adalah program yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini dulunya bernama LDK

(Latihan Dasar Kepemimpinan).

Rombongan bersama pejabat Eselon 1 dan 2 rencananya akan hadir di Plaza Insan Berprestasi Gd. A dalam rangka silaturahmi peserta KKP dengan Mendikbud.■

## SMAN 1 Padang dan LPMP Sumbar Sasaran Irjen di Hari ke-3

**I**rjen Daryanto beserta tim datang ke SMA N 1 Padang dan LPMP Sumatera Barat untuk memantau pelaksanaan UKG di sana.

Daryanto beserta tim tiba pukul 07.30 di SMA N 1 Padang dengan didampingi Kabid Pemetaan dan Supervisi LPMP Sumbar langsung mendatangi kepala sekolah untuk membicarakan persoalan UKG.

Bersama kepala sekolah, Daryanto mendatangi ruangan

UKG untuk melihat langsung pelaksanaan UKG. Pelaksanaan UKG berjalan baik dan dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai.

“UKG di sini saya nilai sangat siap, segala sarana dan prasarana sangat menunjang pelaksanaan UKG ini,” ujar Daryanto.

Dalam kesempatan ini, tak lupa juga Daryanto menyosialisasikan tujuan dari pelaksanaan UKG. Dia juga mengatakan bahwa pelaksanaan UKG ini juga dapat

dijadikan percobaan dalam pelaksanaan Ujian Nasional dengan Sistem Berbasis Komputer (CBT) di tahun depan.

Setelah selesai, Daryanto beserta tim langsung melanjutkan perjalanan ke LPMP Sumbar untuk memantau UKG di sana.

Tiba pukul 09.30, Daryanto langsung menuju tempat pelaksanaan UKG dengan didampingi oleh Mulyansyah, Kabid Pemetaan dan Supervisi LPMP Sumbar.

Seperti sebelumnya,

## Cuplikan Peristiwa

Daryanto fokus pada penegasan tujuan pelaksanaan UKG.

Hal ini disebabkan maraknya berita miring yang beredar mengenai tujuan pelaksanaan UKG. Oleh karena itu, untuk menenangkan para guru dan membenarkan apa yang salah, Daryanto dengan tegas dan jelas selalu menyampaikan hal-hal tersebut.

Di hari terakhir dalam tugas pengawasannya di Sumatera Barat ini, Daryanto menyampaikan bahwa kegiatan UKG di beberapa

titik yang telah Dia kunjungi telah berjalan lancar, tetapi memang masih ada yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya kemampuan guru dalam mengoperasikan komputer dan listrik yang tiba-tiba mati saat ujian berlangsung. ■



## Inspektorat Investigasi Adakan Rapat Klinik/ Fasilitasi Tinjau

Inspektorat Investigasi mengadakan rapat klinik/ fasilitasi tindak lanjut yang diselenggarakan di ruang sidang lantai 4, Gedung B Kemendik-

bud. Rapat Ini akan berlangsung selama tiga hari, Selasa-Kamis (17-19/11).

Peserta yang hadir pada rapat ini adalah perwakilan dari

LPMP DKI, Dinas Pendidikan DKI, Ditjen GTK, Ditjen PAUDNI, Biro keuangan, Ditjen Dikdasmen, Sekjen, dan unit-unit utama Kemendikbud. ■





## Itjen Adakan Rapat Tinjau Penandatanganan Piagam WBK

**I**nspektorat Jenderal mengadakan rapat untuk menindaklanjuti penandatanganan piagam wilayah bebas korupsi (WBK) pada pencanangan Zona Integritas. Rapat diadakan pada Selasa (17/11) siang di ruang sidang lantai 2, Gedung B Kemendikbud.

Peserta yang hadir pada rapat ini adalah Kabag Akuntabil-

itas Kinerja Biro Keuangan Setjen, Kabag Perencanaan dan Pemetaan Kompetensi Biro Kepegawaian Setjen, Kabag Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Organisasi Setjen, Kabag Publikasi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Setjen, Kabag Layanan Terpadu Biro Komunikasi, Kabag Rumah Tangga dan Protokol Biro Umum Setjen, Ketua Satuan Pengawasan

Intern Setjen, Kabag Hukum, Tata laksana, dan Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas, Kasubbag Tata Laksana Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, Kasubbag Kepegawaian Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, Kabag Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Inspektorat Jenderal, serta Kasubbag Hukum dan Tata Laksana Inspektorat Jenderal. ■



# LIMA KEGIATAN UNTUK MENCAPAI TATA KELOLA YANG BAIK

Dalam suatu *workshop*, Phil Leiferman seorang konsultan dan pelatih (*trainer*) dari lembaga IIA (*the Institute of Internal Auditor*) menyampaikan bahwa bila organisasi ingin memiliki tata kelola yang baik (*Good Governance*), maka ada lima kegiatan yang harus dilakukan. Berikut adalah uraian penjelasan singkat dari kelima kegiatan tersebut.

*Oleh: Pandji Dwi Prasetyo*

## 1. Menyusun Rencana Strategis

Organisasi harus memiliki arahan yang jelas (*Clear Direction*) tentang posisi organisasi saat ini, kemana arah tujuan organisasi hendak dibawa, dan bagaimana cara organisasi mencapai tujuan tersebut. Ketiga arahan tersebut dapat dirumuskan dalam dokumen resmi organisasi bernama Perencanaan Strategis (Renstra).

Sebagaimana disepakati bahwa pengertian organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian jelas bahwa tujuan merupakan esensi yang sangat penting dari keberadaan

suatu organisasi. Dalam konsepsi Renstra, tujuan dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis yaitu tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang adalah Visi dan Misi, tujuan jangka menengah adalah sasaran (*goals*), dan tujuan jangka pendek adalah target (*objective*).

Apa pun jenis organisasinya pasti akan berjalan dengan lebih efektif dan efisien bila memiliki renstra. Pimpinan dan anggota organisasi akan memiliki persepsi dan langkah gerak yang sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka organisasi akan menjadi dinamis dan tidak stagnan.

Organisasi akan berkembang menjadi semakin maju dan produktif. Perkembangan organisasi bahkan dapat diukur sesuai tahapan yang diprediksikan dan bila ada permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka akan bisa dilakukan penyesuaian dan revisi atau bahkan menerapkan rencana alternatif (*contingency plan*).

Manfaat lain dari penyusunan rencana strategis adalah adanya kesadaran penuh dari jajaran organisasi tentang kapasitas sumber daya yang dimiliki. Kekuatan dan kesempatan yang dimiliki organisasi akan dieksplorasi seoptimal mungkin, sedangkan kelemahan dan ancaman akan diminimalisasi hingga sekecil-kecilnya. Aset organisasi akan digunakan secara hemat dan tidak berlebihan namun sesuai dengan skala prioritas.

## 2. Melaksanakan Audit Internal

Audit internal harus dilaksanakan dengan baik dalam rangka memastikan bahwa seluruh program terimplementasikan secara efektif dan akuntabel. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan manajemen yang bersih (*clean management*) harus selalu dipegang dengan kuat oleh seluruh jajaran pimpinan dan anggota organisasi.

Audit internal memiliki orientasi pengawasan yang sangat berbeda dengan audit eksternal. Audit internal dilaksanakan oleh para pakar akuntansi organisasi itu sendiri untuk mengidentifikasi kelemahan dan merekomendasikan langkah solutif perbaikan. Audit eksternal dilakukan untuk menilai



akuntabilitas pengelolaan keuangan dan memberikan opini atas laporan keuangan.

Audit internal akan memberikan petunjuk kepada auditor eksternal dalam melaksanakan pengawasannya. Titik-titik lemah yang menjadi objek pembenahan audit internal akan lebih mendapatkan perhatian auditor eksternal. Kemitraan antara auditor internal dan auditor eksternal akan membuat pengawasan terhadap kinerja organisasi menjadi lebih optimal sehingga berbagai penyimpangan prosedur dapat diminimalkan.

## 3. Pelatihan dan Pengembangan

Organisasi yang baik dan ingin terus menjaga keberlangsungan hidupnya dalam jangka panjang harus membuka peluang seluas mungkin kepada pegawainya untuk mengembangkan diri. Organisasi harus menyusun rencana peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan analisis kesenjangan yaitu perbandingan yang objektif

antara kebutuhan kompetensi organisasi dengan ketersediaan kompetensi yang ada saat ini.

Peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui metode pelatihan dan pengembangan. Dua metode ini memiliki orientasi yang berbeda berdasarkan skala waktu pencapaian target pemenuhan kapasitas SDM. Pelatihan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan keterampilan praktis jangka pendek, sedangkan pengembangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manajerial organisasi dalam jangka menengah dan panjang.

Pelatihan harus dirancang secara spesifik. Jenis dan tema pelatihan harus dirancang sedemikian rupa supaya sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam jangka pendek. Pengisian kekurangan kompetensi teknis merupakan tema besar dari tiap pelatihan. Dengan menjalani pelatihan, pegawai akan meningkatkan kompetensinya dan berpengaruh pada peningkatan produktivitas.



#### 4. Melaksanakan rapat bulanan untuk memantau kemajuan program

Manajer harus mengendalikannya kegiatan organisasi secara ketat. Keterlaksanaan program kerja harus dipantau secara harian sehingga program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Manajer harus memiliki media pemantauan berupa sistem informasi manajemen yang efektif dalam memantau kemajuan pelaksanaan program.

Di samping memperhatikan dan mencermati kemajuan pelaksanaan program kerja, manajer juga harus menjamin agar program tersebut benar-benar terlaksana sesuai dengan filosofi perencanaannya. Suatu program dapat saja terlaksana sesuai dengan jadwalnya tetapi substansinya bisa menyimpang dari peruntukan yang semestinya. Selain itu prosedur dan mekanisme pelaksanaannya juga bisa melenceng dari regulasi yang mendasari program tersebut.

Evaluasi harus dilakukan secara cermat untuk mengidenti-

fikasi permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program kerja. Setelah permasalahan teridentifikasi secara jelas dan spesifik, maka harus dirumuskan beberapa alternatif solusi untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya keputusan harus diambil untuk menentukan salah satu solusi terbaik yang paling tepat guna menyelesaikan masalah.

#### 5. Menyusun anggaran berbasis kinerja

Anggaran organisasi disusun untuk mendukung pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan. Program kerja harus ditetapkan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan tujuan yang hendak dicapai. Orientasi program kerja harus jelas dan tidak sekedar menjalankan operasional organisasi yang bersifat rutinitas (*business as usual*). Program kerja harus dirumuskan dengan mengimajinasikan *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan.

Penyusunan anggaran yang mendukung implementasi program

kerja harus menjamin keberlangsungan operasional organisasi dalam melaksanakan kinerjanya. Target kegiatan dalam suatu periode harus ditetapkan secara jelas berikut dengan aktivitas dan sumber daya yang diperlukan termasuk dengan anggarannya. Ketercapaian target jangka pendek dipastikan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.

Dengan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi, dipastikan efektivitas organisasi akan meningkat. Dalam konteks ini konseptual substansi program kerja harus sematang mungkin demi kelancaran kinerja organisasi. Anggaran hanya sekedar media atau alat (*tool*) untuk mendukung program kerja.

Demikian penjelasan dari kelima kegiatan yang harus dilakukan organisasi untuk bisa memiliki tata kelola yang baik. Apabila lima kegiatan tersebut dilaksanakan secara konsisten, tata kelola yang baik pasti dapat diwujudkan. Dengan terwujudnya tata kelola yang baik, organisasi akan dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan lebih baik.

Namun demikian, adagium umum tetap berlaku bahwa niat baik (*good intention*) tetap menjadi landasan utama. Prinsip *the man behind the gun* mengisyaratkan bahwa sebaik-baik dan secanggih apa pun suatu sistem, yang lebih penting adalah integritas sumber daya manusia. Bagaimana pun baiknya suatu sistem, hal itu tidak akan ada gunanya bila ada konspirasi kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pegawai. ■



## AKUNTABILITAS TATA KELOLA DAN KINERJA SEBAGAI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PENGAWASAN FUNGSIONAL PENDIDIKAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kita singkat dengan Kemendikbud memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa yang tertera dalam renstra tahun 2015 Kemendikbud antara lain dalam hal pelayanan masyarakat (Pelayanan Publik) antara lain yaitu mencerdaskan bangsa, memiliki moral yang tinggi, amanah, dan memiliki rasa gotong royong serta memiliki Integritas.

*Oleh: Dr. Salwin MD, M.Pd.*

**H**al ini akan dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kemendikbud tidak terkecuali Inspektorat Jenderal melakukan

analisis-analisis risiko terhadap semua kegiatan program strategis kementerian yang diimplementasikan pada nawacita serta Revolusi Mental. Di dalam revolusi mental

tertuang bahwa jiwa nawacita akan terwujud apabila rasa Kewarganegaraan, dapat dipercaya, kemandirian, kreativitas, gotong royong, dan saling menghargai (nilai), menghormati

# “ hasil pemeriksaan hendaknya dapat memberikan kontribusi atas perbaikan dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan (LK) maupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ”

orang lain, memiliki rasa tanggung jawab sebagai pencerminan budaya bangsa Indonesia. Tahun 2015 ini salah satu lembaga media mengemukakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 memiliki nilai yang amat positif yaitu dalam hal pelayanan publik Kemendikbud mendapat ranking teratas yaitu ranking dua dari tiga puluh empat kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia. Ini merupakan *support* yang positif bagi para auditor dan staf lainnya untuk meningkatkan kinerjanya.

Pihak internal yang terkait dengan Audit Berbasis Risiko (ABR) adalah unit-unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mengharapkan agar temuan-temuan pemeriksaan Itjen dapat memberikan nilai tambah (*added value*) guna peningkatan kinerja unit kerja yang diperiksa. Dengan kata lain, hasil pemeriksaan hendaknya dapat memberikan kontribusi atas perbaikan dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan (LK) maupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan tuntutan dan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tersebut, maka perlu dirumuskan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang akuntabel dan dapat memberikan *added value* bagi peningkatan kinerja setiap entitas

yang diperiksa melalui penerapan Audit Berbasis Risiko. Untuk mengatasi permasalahan pengawasan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, perlu ada terobosan baru dengan upaya penerapan audit berbasis risiko. Pengertian Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko kegiatan dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Adapun risiko adalah setiap hal yang mencegah suatu entitas mencapai tujuannya (*anything that prevents an entity from achieving its objectives*).

Implementasi Risiko dalam Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai visi Inspektorat Jenderal Kemendikbud meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan pendidikan dan kebudayaan yang amanah dan akuntabel dengan misi antara lain meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan pengasawan (audit/reviu) yang independen objektif serta profesional. Melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik' (Stanbury, 2003 dan Mardiasmo, 2006). Maka sebagai kata kunci dari kajian ini

adalah sejauh mana tingkat "efektivitas organisasi dan akuntabilitas kinerja pengawasan fungsional Pendidikan," guna membangun karakter bangsa.

Jenis dan macam resiko yang ada dalam suatu manajemen dapat dikemukakan sebagai berikut. 1) Risiko Melekat atau Risiko Bawaan (*Inherent Risk*), merupakan risiko yang selalu menyertai atau melekat pada aktivitas yang rentan terjadi kesalahan dan ketidakberesan. 2). Risiko Pengendalian (*Control Risk*), merupakan risiko yang disebabkan lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dan yang 3) Risiko Deteksi (*Detection Risk*), merupakan risiko bahwa auditor gagal mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam asersi manajemen auditan. Manajemen risiko jenis dan macam risiko di atas yang perlu ditampilkan pada setiap organisasi atau Satker di masa yang akan datang, sebagai seorang pimpinan.

### A. Permasalahan di Lingkungan Kemendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditengarai belum menerapkan Audit Berbasis Risiko berdasarkan kenyataan-kenyataan dan permasalahan antara lain di bawah ini:

1. Belum diterapkannya Program Manajemen Risiko pada setiap satker di lingkungan Kemendikbud;
2. Belum tercapainya program Wajar 12 Tahun melalui implementasi Pusat dan Daerah yang diintegrasikan dalam unit *cost* pendidikan;
3. Belum tercapainya pengembangan karakter bangsa melalui pendidikan formal dan informal



- yang memadai;
4. Hasil pendidikan saat ini belum mencapai konsep revolusi mental yang mengandung nilai-nilai: *kewarganegaraan, dapat dipercaya, kemandirian, kreativitas, gotong royong, dan saling menghargai, sebagai pencerminan budaya bangsa Indonesia*;
5. Penyaluran dana untuk sarpras pendidikan ke daerah belum sesuai kebutuhan;
6. Penyaluran dana pendukung pendidikan untuk daerah 3T (terluar, terbelakang dan terpencil sering) tidak sampai;
7. Isu pendidikan gratis hanya menjadi komoditi dalam kampanye pilkada;

8. Masih banyak aparatur negara yang menangani pendidikan tersangkut masalah hukum;
9. Masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan UN, penerapan Kurikulum 2013, dan maraknya perkelahian antar pelajar;
10. Tata kelola Kemendikbud belum sepenuhnya mencerminkan karakter bangsa objektif dan profesional;
11. *Data base* pendidikan Kemendikbud setiap daerah dan nasional tidak valid;
12. Pelaksanaan audit yang tidak didukung dengan perencanaan dan *data base* yang memadai.  
Guna meningkatkan layanan terhadap *Stakeholder* dan masyarakat.

Adapun hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam mengambil kebijakan, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kekuatan dalam mengambil kebijakan antara lain mempunyai pengalaman yang sudah lama jadi pengawasan, komitmen kuat terutama Substansi Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kebudayaan dan Manajemen Risiko serta garis koordinasi yang dibangun selama ini sebagai kekuatan yang sulit dapat diimbangi oleh kementerian dan lembaga lainnya, karena substansi pendidikan dan kebudayaan merupakan substansi yang unik dan beragam jenjang, guna membentuk karakter dan



Pelaksanakan Diklat yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. (bcpk.go.id)

moral bangsa. Untuk itu, melalui Perencanaan Program Operasional (P2O) tiap-tiap Inspektorat, sejak dini mulai memprogramkan perlunya melakukan analisis-analisis risiko, baik pada diri pribadi auditor masing-masing, sesuai program perencanaan kegiatannya, maupun pada auditan sebagai subjek audit yang setiap saat terus berkembang dan mengembangkan diri serta organisasinya;

2. Kekuatan yang kedua yang dimiliki auditor yaitu sebagai syarat utama dan didukung oleh aturan menyertainya dalam melaksanakan tugas di lapangan sehingga telah memiliki keahlian dari sertifikat Jabatan Fungsional (JFA) yang diperolehnya yaitu sertifikat audit penyelia anggota tim (AT) bagi non sarjana, dan sertifikat audit ahli anggota tim (AT), ketua tim (KT), pengendali teknis (PT), dan pengendali mutu (PM) bagi auditor yang

telah sarjana (S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, & S<sub>3</sub>) dan memilikinya. Sertifikat ini merupakan suatu kekuatan baik dalam analisis audit di lapangan, maupun dalam menyusun tim dan analisis-analisis risiko program kegiatan.

Dengan demikian, salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh auditor, maka untuk memperoleh sertifikat tersebut tidak mudah yang kita bayangkan, karena dalam memperoleh sertifikat ini melalui seleksi dan diklat serta ujian kelulusannya, tidak seperti sertifikat lainnya secara substansi langsung dapat diterima oleh peserta setelah diklat. Maka dari perolehan sertifikat JFA ini merupakan suatu kekuatan yang sulit dapat diimbangi, dengan syarat bahwa pemilik sertifikat JFA itu benar-benar objektif dan profesional dalam perolehannya dan pemanfatannya secara bertanggung jawab yang akuntabel. Artinya tidak hanya memiliki sertifikat

JFA belaka, tetapi menggunakan dan mempertanggungjawabkannya dengan benar. Oleh karena itu, kekuatan ini merupakan dasar analisis terhadap risiko-risiko yang akan di hadapi dalam pelaksanaan tugas sejak dini atau sejak perencanaan sampai kepada pelaporan yang digunakan oleh pimpinan benar-benar kinerja yang dituntut harus akuntabel;

3. Adapun kekuatan yang ketiga adalah auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu telah berpengalaman dan sangat memahami substansi baik itu memiliki risiko tinggi, sedang, dan rendah. Oleh karena itu, tidak salah jika perencanaan program operasionalnya perlu sangat terlebih dahulu dilakukan analisis yang cukup mendalam dan bijaksana. Agar tahu prioritas mana yang terlebih dahulu dilaksanakan untuk meminimalisasikan risiko yang rendah tapi objektif dan



profesional. Sebelum semua kegiatan itu diprogramkan pada tahun anggaran berikutnya. Kemudian bagi para auditor juga cukup berpengalaman dalam organisasinya, maka dari itu tidak salah jika perencanaan program kegiatan pada unit atau Satker setiap tahunnya, terlebih dahulu dilakukan analisis-analisis risiko dari yang paling tinggi sampai ke yang terendah, baru ditentukan prioritasnya, agar pada waktu program kegiatan itu dijalankan risiko-risiko yang akan muncul dapat diantisipasi dengan hal analisis dan tindakan yang harus dilakukan.

## B. Rencana Aksi Akuntabilitas Tata Kelola & Kinerja Pengawasan Fungsional Pendidikan

Adapun program dan rencana aksi ke depan dan sampai seterusnya, dapat dikemukakan bahwa tiap-tiap Inspektorat satu, dua, tiga dan

investigasi, sejak dini penyusunan perencanaan program kegiatan audit harus transparan dan akuntabel. Dalam arti apa yang dimunculkan dalam DIPA dan RAKKL, semuanya telah melalui suatu analisis yang tajam dan sudah memiliki data risiko yang muncul. Maka dari itu melalui suatu analisis dari yang rendah, sedang dan tinggi, untuk menentukan prioritas audit, reviu dan pemantauan karena telah didukung oleh sumber daya yang sangat memadai baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya lain sebagai pendukungnya, seperti keuangan, dan fasilitas sarana prasana, serta teknologi informasinya (TIK).

Makalah ini diharapkan sebagai penerapan Audit Berbasis Risiko (ABR) berserta manajemen risiko pada setiap-Dipa-Satker yang diaudit harus diterapkan penuh konsekuen dan kemitraan guna pembinaan berkelanjutan sehingga lebih akuntabel dan bertanggung jawab, mengamankan kebij-

kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga dunia pendidikan dapat membangun karakter dan moral bangsa di masa depan.

## C. SIMPULAN

Adapun simpulan dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Implementasi Risiko sebagai representatif Manajemen Risiko Akuntabilitas Kinerja sebagai landasan tata kelola pengawasan fungsional pendidikan dan kebudayaan. Landasan karakter bangsa, tidak terlepas dari tolak ukur kebijakan pengawasan fungsional oleh lembaga publik guna mewujudkan *good government*.
2. Auditor dan pimpinannya harus memiliki komitmen yang kuat dan transparan terkendali dalam mengambil suatu kebijakan. (*Auditor Utama Itjen Kemendikbud*). ■

# PERAN BARU SATUAN PENGAWASAN INTERN

Oleh: Sutoyo

## 1. Sebagai penguat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

SPI harus terus menerus mendorong implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara konsisten. SPI harus berupaya untuk membentuk persepsi yang sama antarsesama pegawai dalam memaknai SPIP. Masih banyak pegawai yang menganggap bahwa Sistem Pengendalian Internal sama dengan Satuan Pengawasan Intern. Hal ini sebenarnya sangat keliru karena di samping makna yang berbeda, penanggung jawab dan perannya juga sangat berlainan.

SPIP adalah sistem yang terkandung dalam organisasi (*built in*) untuk mengendalikan seluruh kegiatan dan risikonya secara transparan sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. SPIP harus diterapkan oleh

pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Saat ini persepsi yang dipahami pegawai adalah SPIP dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern. Persepsi tersebut tentunya sangat tidak tepat. Pandangan yang tepat adalah bahwa Satuan Pengawasan Intern bertugas untuk memantau sejauh mana efektivitas implementasi SPIP.

SPI harus membantu pimpinan satuan kerja dalam menerapkan SPIP secara efektif meliputi lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, analisis risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan. Kelima komponen SPIP tersebut bila dilaksanakan secara efektif dan konsisten, akan menghasilkan tata kelola yang bersih dan baik (*clean and good governance*).

## 2. Sebagai penjamin mutu program reformasi birokrasi

SPI memantau sejauh mana kegiatan-kegiatan yang diagendakan dalam program reformasi birokrasi dijalankan. Ada enam kegiatan yang merupakan faktor-faktor pengungkit (*enabler*) meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, peningkatan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Saat ini Kemendikbud sudah mencanangkan 3 unit utama sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Ketiga unit utama ini harus menjalankan program reformasi birokrasi secara tepat agar dapat mempertahankan predikat WBK dan memperoleh legitimasi dari Kementerian PAN dan RB.

SPI membantu pimpinan satuan kerja untuk memperoleh predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dengan semakin banyak satuan kerja berpredikat WBK, maka Kemendikbud akan menjadi Zona Integritas.

“ SPI harus mengingatkan bahwa apabila satuan kerja tidak disiplin dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan, hal ini bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. ”

Hal ini dikenal dengan istilah konsep pulau-pulau integritas (*island of integrity*). Dengan terwujudnya Kemendikbud sebagai Zona Integritas, diharapkan aparaturnya menjadi semakin terjaga integritasnya dan mampu menghindari perilaku yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

### 3. Sebagai penjamin mutu program penguatan integritas dan anti korupsi

SPI mendorong Bagian Kepegawaian untuk menjalankan program penguatan integritas dan anti korupsi. SPI harus memantau kekuatan dan kelemahan sistem integritas aparatur yang ada di lingkungan unit kerjanya. Tiap unit utama sudah memiliki kader-kader integritas yang disebut dengan istilah Tunas Integritas antara lain para pejabat eselon I, II, dan III.

SPI memantau peran yang dijalankan oleh para Tunas Integritas yaitu sebagai agen perubahan (*agent of change*). Para Tunas Integritas semestinya harus terus menerus menyuarakan *spirit* antikorupsi berdasarkan nilai-nilai Kemendikbud yaitu integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, meritokrasi, terlibat aktif, dan ikhlas.

Para Tunas Integritas harus diberikan motivasi untuk berperan sebagai pemimpin pionir yang memberikan contoh keteladanan. Pemimpin harus

memberikan contoh keterbukaan dengan cara mengungkapkan harta kekayaan yang dimilikinya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

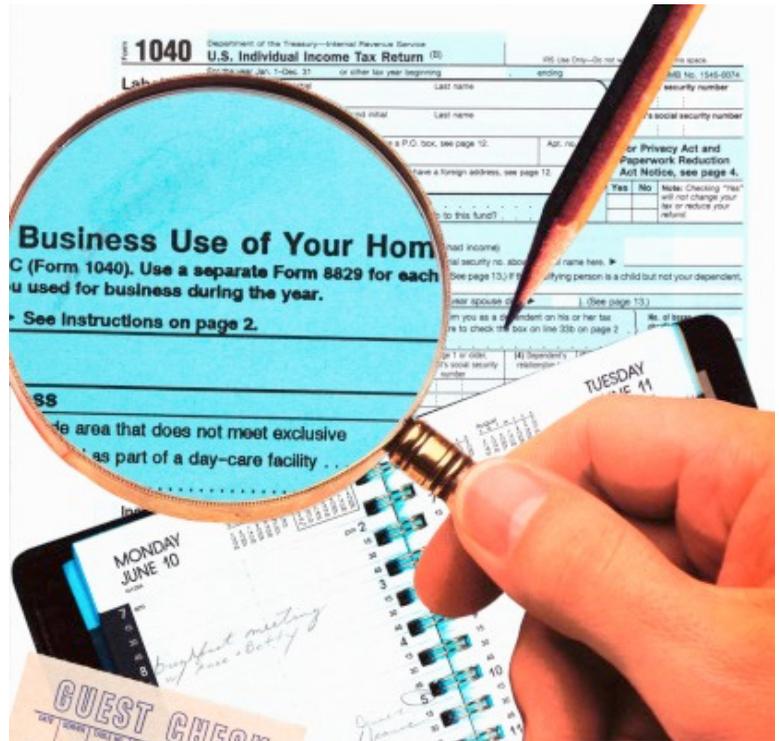
### 4. Sebagai pemantau tindak lanjut hasil pengawasan

SPI harus mendorong secara terus menerus kepada semua pihak yang terkait dalam organisasi untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan. Rekomendasi hasil audit sesungguhnya merupakan masukan kepada satuan kerja untuk memperbaiki kondisi yang dinilai masih lemah.

SPI harus membina satuan kerja untuk menyusun rencana

aksi dan jadwal target penyelesaian tindak lanjut. Target penyelesaian harus bisa diukur dengan mempertimbangkan fakta dan kendala. Kronologis dan dokumen pendukung harus disimpan secara rapi, tertata, dan lengkap sebagai bahan untuk menjadi argumentasi yang memadai kepada aparat pengawasan terkait.

SPI harus mengingatkan bahwa apabila satuan kerja tidak disiplin dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan, hal ini bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Di samping itu, tindak lanjut yang dilakukan dengan baik juga menjadi salah satu indikator diberikannya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.■



# EVALUASI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI PROVINSI DKI JAKARTA)

**Sejalan dengan perkembangan politik di Indonesia, dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI dengan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka kebijakan pemerintah mengenai Ujian Nasional mengalami perubahan.**

**Oleh: Dr. Candra Irawan, M.Si.  
Iwan\_perkasa@yahoo.co.id**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maka Ujian Nasional tidak lagi menentukan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan. Pasal 68 Peraturan Pemerintah tersebut Ujian Nasional berfungsi sebagai salah satu pertimbangan (a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; (b) menentukan capaian standar kompetensi lulusan; (c) pembinaan atau pemberian bantuan kepada satuan pendidikan.

Sejak tahun 2005 pelaksanaan Ujian Nasional terkait dengan kelulusan siswa selalu menimbulkan kontra di masyarakat. Toto Suharya mengkritisi pada Harian Pikiran Rakyat Bandung tanggal 30 April 2009, "Rasanya tidak adil jika kecurangan UN ini hanya ditimpakan kepada guru, kepala sekolah, dan para pemangku jabatan dalam menjaga gengsi. Perlu dipahami bahwa keberhasilan pendidikan di sekolah tidak hanya ditunjang sekolah saja tetapi masih perlu campur tangan masyarakat,". Sedangkan Satria Dharma (2009) Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, mengkritisi

apakah pemetaan mutu pendidikan Indonesia harus menggunakan ujian bersekala nasional dan dilakukan pada semua siswa di seluruh Indonesia, hanya untuk pemetaan mutu pendidikan bisa menggunakan metode *sampling* dengan mengambil *sample* secara tepat kita bisa melihat kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, dengan lebih cepat, tepat dan murah tanpa eksek seperti sekarang. Elin Driana, Ph.D. (2010) Dosen PPs Universitas Muhammadiyah Prof.Hamka Jakarta, mengkritisi bahwa hingga saat ini masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas pemetaan seperti apa yang telah didapatkan, skema-skema intervensi apa yang akan dilakukan dan bagaimana efektivitasnya dari intervensi yang telah dilakukan tersebut.

Pandangan kontra terhadap Ujian Nasional telah banyak disampaikan, akan tetapi pandangan pro Ujian Nasional juga banyak dikaji sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (2008) sebagai berikut: 1) UN berkaitan langsung dengan standar nasional kualitas pendidikan, apabila standar nasional tidak ada, yang akan menikmati negara ini hanyalah sekelompok orang yang

sekolahnya sudah baik. Keberadaan standar nasional pendidikan akan bermanfaat bagi pemetaan mutu pendidikan antarsekolah, antarwilayah kabupaten/kota, dan antarprovinsi. Melalui pemetaan mutu pendidikan dapat memperkecil variabilitas antarsekolah, antar kabupaten/kota, dan antarprovinsi di seluruh Indonesia, 2) Hasil Ujian Nasional untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan belum banyak dipahami dan dilaksanakan secara tepat oleh sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi, 3) Ujian Nasional juga dilaksanakan di negara-negara lain untuk mengukur mutu pendidikan tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat; 4) Ujian Nasional dapat mengukur capaian kompetensi atau hasil belajar siswa;

## Metode dan Tujuan Penulisan

Masalah yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah Pemahaman Konsep Pemetaan Mutu Pendidikan Dari Hasil Ujian Nasional oleh para *stake holder* pendidikan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menilai bagaimanakah pemahaman tentang konsep/deskripsi pemetaan mutu program dan satuan pendidikan berdasarkan implementasi di sekolah dan dinas pendidikan di DKI Jakarta.

Studi kasus ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di 6 (enam) SMP dan 6 (enam) SMA. Data-data juga dikumpulkan dari Puspendik,



Balitbang Kemendikbud.

Metode penulisan yang dipergunakan adalah pendekatan evaluasi, melalui proses pengumpulan data, analisis data, dan identifikasi hambatan-hambatan dalam pemetaan pendidikan.

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan teknik interaktif.

## Konsep Pemetaan Pendidikan oleh Kepala Sekolah

Pemahaman mengenai konsep atau pengertian mengenai pemetaan mutu pendidikan oleh sekolah dalam hal ini oleh Kepala Sekolah dapat diuraikan sebagai berikut:

Rohmani Kepala SMPN 229 Jakarta Barat, Bambang K, Kepala SMPN 1 Cikini Jakarta Pusat dan Deddy Suryadi, Kepala SMPN 20 Jakarta Timur menjelaskan bahwa "Pemetaan pendidikan adalah untuk siswa, bukan untuk sekolah atau untuk guru, pemetaan mutu

pendidikan adalah menggambarkan posisi hasil belajar siswa di sekolah pada mata pelajaran tertentu yang masih perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan/difokuskan dalam PBM, selain itu juga dapat diketahui rangking sekolah di DKI."

Terkait dengan daya serap materi mata pelajaran yang lemah pada level provinsi, kabupaten/kota tidak pernah diketahui oleh sekolah apalagi sampai kelemahan pada pokok bahasan atau materi pelajaran.

Penjelasan lain tentang pemetaan mutu pendidikan disampaikan oleh Saryono, Kepala SMA 112 Jakarta Barat, dan Hj. Rita N Kepala SMAN 7 Jakarta Pusat, dan Riyono Kepala SMAN 86 Jakarta Selatan, "Bahwa dengan pemetaan pendidikan kita dapat mengetahui rangking sekolah kita dibandingkan dengan sekolah lain, dan berusaha meningkatkannya", Pemetaan mutu program/satuan pendidikan lebih pada pendekatan rangking sekolah



dibandingkan daya serap per mata pelajaran/materi pelajaran.

Husin, Kepala SMKN 29 Jakarta Selatan, di SMKN 29 pemetaan sudah dilakukan dari awal, bukan setelah Ujian Nasional, di situlah awal pemetaan mutu, yaitu dengan adanya kisi-kisi Ujian Nasional, dibuatlah model-model soal Ujian Nasional. Untuk guru dipilah-pilah mana yang mungkin mengajar di kelas tiga dan guru yang tidak mungkin untuk mengajar di kelas tiga. Pemahaman ini juga menempatkan perlunya pemetaan untuk guru, dan pemetaan sudah dilakukan sebelum Ujian Nasional.

Erni Mawarni, Kepala SMKN 60 Jakarta Barat mengatakan, “pemetaan mutu program/satuan pendidikan adalah untuk siswa, bukan untuk guru, akan tetapi untuk siswa yang akan ikut Ujian Nasional tahun depan tidak relevan, karena *input* siswa setiap tahun berbeda dan hasilnya tentu berbeda.”

Fitriani Ilozi dan Odah Saodah, Wakasek pada SMKN 10 Jakarta Timur menjelaskan “pemetaan mutu program/satuan pendidikan adalah menggambarkan hasil belajar siswa dan kelemahan-kelemahannya untuk diperbaiki ketika akan melanjutkan pendidikannya.”

### **Konsep Pemetaan Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta**

Lasro Marbun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengenai pemetaan pendidikan menjelaskan sebagai berikut: 1) pemetaan mutu pendidikan di DKI dapat diketahui dari hasil Ujian Nasional misalnya, di tingkat wilayah kota, sekolah-sekolah yang berada di wilayah Jakarta Selatan lebih mendominasi prestasi hasil belajar, diikuti oleh wilayah Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Daerah elit lebih mudah menyelesaikan Ujian Nasional karena ditopang

dengan les atau kursus-kursus dan bimbil dikarenakan faktor ekonomi orang tuanya yang mampu; 2) pemetaan berikutnya adalah pemetaan antarsekolah baik antarsekolah di lingkungan kecamatan dan kelurahan serta antarwilayah kota. Sekolah-sekolah klasik seperti SMA 8, SMA 68, SMA 70, SMA 6, SMP 19, SMP 216, SMP 81, SMP 252, SMK 4, banyak mendominasi prestasi dalam Ujian Nasional, hal ini disebabkan karena *input*/masukan berupa siswa yang lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah lainnya karena ditunjang kondisi ekonomi orang tuanya yang lebih mampu; 3) pemetaan berikutnya adalah pemetaan guru, di provinsi DKI Jakarta belum ada pemetaan terhadap guru, dalam pengertian belum pernah dilakukan kajian apakah guru yang berasal dari fakultas pendidikan (IKIP) lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan guru yang berasal dari bukan fakultas keguruan (Universitas).

### **Analisis**

Terkait konsep pemetaan mutu pendidikan, secara formal belum ada terbitan atau definisi resmi yang dijadikan rujukan oleh sekolah, akan tetapi semua pemahaman akan konsep pemetaan mutu pendidikan yang ada saat ini yang dapat dijadikan sumber dalam mendikripsikan pengertian pemetaan pendidikan secara tepat sesuai kebutuhan yang menjadi acuan Puspendik Balitbang Kemendikbud Dikdasmen, mengenai pengertian atau konsep pemetaan mutu pendidikan sebagai hasil dari Ujian Nasional, secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Ujian Nasional salah satu kegunaannya adalah untuk mengetahui capaian kompetensi hasil belajar siswa setelah selama beberapa tahun belajar. UN hanya mengukur sebagian kecil dari *output* pembelajaran, di seluruh dunia Ujian Nasional juga demikian yaitu hanya mengambil sebagian *output* pembelajaran pada aspek kognitif.

Selain *output* juga ada aspek *input* dan proses yang dilaksanakan oleh sekolah. *Output* yang paling penting adalah lulusan. Hasil Ujian Nasional dilaporkan kepada siswa dalam SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional), yang merupakan gambaran dari hasil belajar dari sekolah, dan hasil gabungan nilai sekolah dan hasil Ujian Nasional. Sekolah juga menerima laporan capaian hasil belajar untuk setiap mata pelajaran, bahkan hasil Ujian Nasional setiap pokok bahasan dalam setiap pelajaran (misalnya Matematika, IPA, Bahasa Inggris) dapat diketahui kelemahannya apa sehingga guru bisa lebih diperkuat lagi.

Dari laporan hasil Ujian Nasional yang disampaikan ke sekolah, akan diketahui capaian hasil Ujian Nasional sekolah tersebut pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Jika ternyata capaian hasil Ujian Nasional pada tingkat sekolah masih di bawah capaian tingkat kabupaten/kotamadya, maka hasil Ujian Nasional tersebut dapat dipergunakan sebagai umpan balik oleh sekolah untuk perbaikan pembelajaran sehingga dapat melampaui capaian tingkat kabupaten/kota. Demikian juga jika tingkat kabupaten/kota masih di bawah capaian tingkat provinsi,



maka hasil Ujian Nasional dapat dipergunakan sebagai umpan balik bagi dinas pendidikan kabupaten/kota untuk memperbaiki pembelajaran agar mencapai tingkat provinsi, demikian juga dengan hasil Ujian Nasional tingkat provinsi diharapkan melebihi hasil Ujian Nasional tingkat nasional“.

Pemetaan mutu program/satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional selama ini lebih terfokus pada tingkat kelulusan dan tingkat capaian daya serap mata pelajaran oleh siswa, artinya pemetaan mutu pendidikan sebagai materi atau bahan mentahnya diambil dari hasil Ujian Nasional siswa sehingga keberhasilan atau ketidakcapaian mutu pendidikan di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi maupun skala nasional, tergantung pada nilai Ujian Nasional siswa. Meskipun demikian, hasil belajar siswa diharapkan akan dapat menjelaskan bagaimana kualitas atau

mutu *input* dan proses PBM di sekolah serta kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten/Kota atau provinsi serta nasional yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan di sekolah.

Pemetaan program/satuan pendidikan selama ini tidak pernah mendapat perhatian. Hasil Ujian Nasional sebagai alat pemetaan mutu program/satuan pendidikan perlu ada *follow up*-nya dari Direktorat Jenderal terkait, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Sekolah, sedangkan laporan hasil Ujian Nasional secara lengkap, telah disampaikan dalam bentuk *softcopy* kepada pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Implikasi pemanfaatan hasil UN untuk pemetaan mutu program/satuan pendidikan dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki faktor *input*, proses, *output*, dan *outcome* pembelajaran, melalui pemberian bantuan kepa-



da sekolah-sekolah yang nilainya masih di bawah standar atau di bawah capaian kompetensi yang ditentukan sehingga lulusan siswa di provinsi DKI Jakarta akan memiliki daya saing yang tinggi dalam pasar tenaga kerja termasuk memasuki PTN.

### Kesimpulan

1. Pemetaan mutu/satuan pendidikan masih dipahami secara beragam oleh *stakeholder* pendidikan baik pada level sekolah, dinas pendidikan, dan pusat dalam hal ini di Balitbang Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan sehingga langkah-langkah perbaikan PBM dari hasil Ujian Nasional melalui pemetaan pendidikan dikhawatirkan belum dapat ditindaklanjuti/*follow-up* sesuai harapan.

2. Pemetaan mutu program/satuan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, lebih bertumpu pada hasil Ujian Nasional siswa, sedangkan mutu pendidikan merupakan suatu sistem yang meliputi peran siswa, guru, sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah

baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, beserta manajemen pendidikannya sehingga tidak menjadikan siswa sebagai aspek yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan mutu pendidikan.

### Rekomendasi

1. Pemetaan pendidikan saat ini merupakan sistem yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama bagi sekolah-sekolah di wilayah-wilayah yang capaian standar mutu pendidikannya masih di bawah standar sehingga perlu diterbitkan suatu pedoman atau juklak yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggungjawab bagaimana mem-*follow up* hasil Ujian Nasional sebagai pemetaan mutu program/satuan pendidikan sehingga setiap sekolah dapat menindaklanjuti hasil pemetaan mutu pendidikan secara tepat.
2. Ujian Nasional bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu dikembangkan sistem pendidikan yang dapat menjamin mutu (*quality assurance*) pendidikan secara efektif dan efisien dengan mengembangkan manajemen pendidikan yang komprehensif yang dapat meningkatkan peran siswa, guru, sekolah, orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang didukung oleh perangkat lunak yang memadai. ■

“ Pemetaan pendidikan saat ini merupakan sistem yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama bagi sekolah-sekolah di wilayah-wilayah yang capaian standar mutu pendidikannya masih di bawah standar ”

# NILAI-NILAI BUDAYA KERJA KEMENDIKBUD

Memiliki persepsi dan gerak yang sama untuk memajukan institusi. Untuk itu diperlukan suatu media yang dapat menyatukan hati para pegawai. Media itu dikenal dengan istilah budaya kerja organisasi (*Corporate Culture*) yang terdiri dari nilai-nilai yang menjadi konsensus/kesepakatan bersama seluruh anggota organisasi.

*Oleh: Sunarto*

Dalam Rencana Strategis Kemendikbud periode 2015-2019 tercantum tujuh nilai yang harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur Kemendikbud. Tulisan ini menguraikan secara singkat penjelasan dari ketujuh nilai tersebut.

## Integritas

Integritas adalah keutuhan pribadi, keselarasan, dan keharmonisan antara pola pikir, pola sikap/perilaku, pola ucap, dan pola tindak. Pribadi yang utuh tidak akan melakukan kegiatan yang kontradiktif atau bertentangan antara ucapan dengan perbuatan. Keselarasan harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan kebaikan yang berlaku dalam masyarakat.

Pegawai telah menjalani kehidupan dengan sejarah dan latar belakang pengalaman yang berbeda-beda, tetapi dapat dipastikan bahwa dalam perjalanannya ia pasti telah dibekali dengan berbagai nilai yang berisi kebaikan dan kemuliaan. Sumber-sumber pembekalan nilai kepada pegawai antara lain adalah keluarga, agama, masyarakat, organisasi, bangsa, dan universal.

Pegawai Kemendikbud harus memiliki integritas yang

baik sehingga bisa mempunyai keteguhan prinsip-prinsip kemuliaan diri. Institusi Kemendikbud adalah lembaga yang sangat mulia karena mengemban amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemendikbud adalah Kementerian tempat orang-orang berpendidikan tinggi dan wadah bagi para pendidik sehingga menjadi benteng pertahanan terakhir tempat publik bertanya tentang integritas.

Dengan adanya integritas diri, maka pegawai Kemendikbud pasti dapat membedakan mana perilaku yang baik dan yang tidak baik sehingga bisa menghindari dari perilaku tercela seperti korupsi yang saat ini sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Pegawai Kemendikbud harus menunjukkan contoh keteladanan yang baik (*role model*) di mata publik.

## Kreatif dan Inovatif

Pegawai Kemendikbud harus selalu melakukan berbagai upaya yang baru dan tidak berpatokan pada hal-hal yang sudah biasa dilakukan (*business as usual*). Memang hal yang biasa dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah memiliki



pengalaman dalam menerapkan praktik terbaik. Namun demikian, tidak pula menutup kemungkinan bahwa hal yang sudah biasa dilakukan tersebut ternyata adalah praktik yang salah tetapi masih belum ditangani dengan tepat.

Pembaruan positif harus selalu dilakukan dan dikembangkan. Gagasan pegawai yang inovatif sangat dihargai dan diapresiasi oleh pimpinan. Terobosan baru harus selalu dilakukan untuk menyederhanakan proses penyediaan layanan. Mata rantai layanan yang panjang harus diperpendek dan prosedur yang berbelit-belit harus disederhanakan demi peningkatan mutu pelayanan publik.

Layanan pendidikan dan kebudayaan harus selalu diperbaharui demi peningkatan kepuasan publik. Cara yang paling efektif agar layanan tersebut dapat terus diperbaharui adalah melalui pemberdayaan pegawai. Pengambilan keputusan tidak harus selalu dilakukan oleh pejabat tetapi juga

bisa dilakukan oleh pegawai dengan tetap merujuk pada akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja yang semestinya.

## Inisiatif

Pegawai Kemendikbud harus mengambil prakarsa dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Pegawai harus berani mengambil risiko untuk berada satu atau beberapa langkah di depan. Keberanian ini juga harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan hati-hati sehingga tidak dilaksanakan secara serampangan. Keberanian harus mempertimbangkan koridor peraturan perundangan, kepatutan, dan tidak merugikan kepentingan publik.

Pegawai Kemendikbud akan terus didorong untuk membina jiwa kepemimpinan karena pegawai adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Pegawai harus membina dirinya dengan mengambil sebanyak mungkin prakarsa yang secara realistis bisa

dilakukan. Banyak prakarsa yang bisa dilakukan tanpa harus selalu berkonsultasi dengan atasan langsung demi mempercepat dan meningkatkan mutu layanan, dan bukan dengan niat untuk membangkang pada atasan.

Pegawai harus lebih memahami situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat terkait dengan pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan. Isu dan keresahan masyarakat tentang pendidikan harus mendapatkan tanggapan yang cepat dari para pengelola program. Pegawai harus mampu mengambil langkah yang cepat tanggap tidak hanya sekedar untuk pencitraan kementerian, tetapi benar-benar dengan hati yang tulus demi memenuhi kebutuhan publik.

## Pembelajar

Pegawai Kemendikbud harus memiliki antusiasme dan gairah yang tinggi untuk selalu belajar. Saat ini pegawai memiliki banyak alternatif media sebagai sumber materi pembelajaran. Saat ini pegawai dapat belajar melalui buku, surat kabar, internet, dan lain-lain. Kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan di bangku sekolah dan perguruan tinggi, tetapi harus dilakukan sepanjang hayat dikandung badan.

Pengetahuan yang dimiliki pegawai akan dikelola secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen ilmu (*knowledge management*). Bagian Kepegawaian akan memantau sejauhmana pengetahuan yang dimiliki pegawai dan relevansinya untuk mendukung kinerja pelaksanaan

tugas. Jenis kompetensi pegawai juga harus didata secara lengkap oleh satuan-satuan kerja Kemendikbud.

Pegawai akan dipantau dan difasilitasi pengembangan kompetensinya. Kemendikbud akan memastikan bahwa para pegawainya memiliki kompetensi yang memadai sehingga kinerja pegawai dapat menjadi lebih produktif dan optimal. Kompetensi yang dimiliki pegawai harus lengkap mencakup 3 aspek yaitu wawasan, keahlian, dan sikap/perilaku (*integrity*).

Hal yang sangat penting adalah jiwa dan semangat pegawai itu sendiri yang harus selalu ditumbuhkan dan dikembangkan terus menerus. Pegawai harus memiliki sikap mental yang kuat untuk terus belajar hingga hari tuanya. Pegawai harus didorong untuk banyak membaca dan mempelajari berbagai hal yang baru di banyak media dan di mana saja. Informasi adalah jendela dunia dan menjadi bahan paling penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

### Meritokrasi

Pegawai Kemendikbud diberikan kesempatan yang luas untuk menunjukkan kinerja yang tinggi karena akan diberi penghargaan dan apresiasi sesuai dengan kinerjanya. Keadilan merupakan faktor kunci terpenting dalam budaya meritokrasi yang intinya adalah seseorang akan diberikan penghargaan sepadan dan adil sesuai dengan jerih payah yang dihasilkannya.

Pegawai Kemendikbud akan memiliki jalur karier yang jelas

sesuai dengan kompetensi dan prestasinya. Pilihan karier yang dapat ditempuh oleh pegawai disediakan oleh Kementerian secara jelas dan spesifik. Pegawai dapat memiliki pilihan alternatif karier apa yang diharapkan. Pegawai akan dinilai secara objektif sesuai dengan kontribusi yang diberikannya.

Pilihan karier yang dapat ditempuh pegawai bisa direncanakan secara realistis. Pegawai diberi kesempatan secara luas untuk mengikuti proses manajemen bakat (*talent management*) yang dilakukan secara terbuka dan transparan. Hasil dari proses seleksi tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama dalam menentukan calon-calon pimpinan di lingkungan Kemendikbud.

Proses seleksi terbuka akan mengukur kompetensi dan kesesuaian (*fitness*) antara kapabilitas kandidat dengan posisi jabatan yang diminatinya. Proses

seleksi ini menggunakan metode algoritma yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menilai kecocokan antara kompetensi dengan kriteria jabatan yang dipersyaratkan.

### Terlibat Aktif

Pegawai Kemendikbud harus selalu aktif dan dinamis dalam bekerja. Pegawai tidak boleh hanya menunggu perintah dari atasan dalam melaksanakan tugasnya. Banyak hal di era teknologi komunikasi dan informasi serta globalisasi yang harus direspon dan ditanggapi secara cepat dan tepat. Keterlambatan dalam menanggapi perubahan tersebut akan berdampak pada produktivitas.

Pegawai Kemendikbud tidak boleh menutup mata terhadap berbagai perkembangan dan fenomena yang terjadi di lingkungannya. Perkembangan situasional harus dicermati secara kritis terutama hal-hal yang





berpotensi berdampak signifikan pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Pegawai harus berkomitmen tinggi untuk selalu menyediakan layanan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi.

Pegawai Kemendikbud didorong untuk menyampaikan gagasan konstruktif demi kemajuan institusi. Pegawai disediakan banyak wahana untuk berdiskusi seperti *workshop*, seminar, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), dan lain-lain. Kemendikbud memiliki pendekatan yang berimbang antara *top down* dengan *bottom up*.

Gagasan pegawai sangat dihargai untuk diakomodir dalam perumusan kebijakan publik. Keterlibatan pegawai akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) untuk memajukan organisasi.

### Tanpa Pamrih

Pegawai Kemendikbud harus menilai bahwa bekerja itu sama dengan berkarya yang bernilai ibadah. Bekerja tidak hanya sekedar urusan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bekerja adalah nilai keberadaan dirinya. Kehidupan pribadi pegawai harus memberikan kemanfaatan yang besar terhadap bangsanya.

Pegawai tidak boleh bekerja dengan selalu memperhitungkan imbalan yang akan diperolehnya. Pegawai harus ditumbuhkan kesadaran untuk memberikan yang terbaik dari potensi dirinya sebagai sumbangsih pengabdian kepada bangsa dan negara. Inilah esensi bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang memiliki karakteristik sangat berbeda dengan karyawan swasta yang memang berorientasi pada mencari laba.

Bekerja dengan hati akan menghasilkan karya terbaik yang muncul dari sanubari terdalam. Pegawai yang baik adalah pegawai yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap pekerjaannya.

Keikhlasan dalam bekerja justru akan menjadi sumber kebahagiaannya. Kepercayaan dan kehormatan diri menjadi penghargaan besar bagi dirinya melebihi kompensasi finansial yang walaupun jumlahnya besar tetapi sesungguhnya nilainya sangat kecil.

Demikian tujuh nilai budaya kerja Kemendikbud yang diharapkan dapat dipahami dan dijiwai oleh seluruh pegawai. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk membantu pegawai dalam mengenali dan memahami tujuh nilai budaya kerja serta dapat menerapkannya dalam kehidupan dunia kerja sehari-hari di lingkungan Kemendikbud. ■

# PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (KOMITMEN KUAT PENCEGAHAN KORUPSI)

*Oleh: Jupri Karno*

Pada hari Selasa, 6 Oktober 2015 diselenggarakan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Mendikbud Anies Baswedan di Plaza Insan Berprestasi Gedung Ki Hajar Dewantara. Pencanaan ini disaksikan oleh 4 orang saksi yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Chrisnandi, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnaen, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana, dan Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polsoskam BPKP Binsar Simanjuntak.

Dalam momentum ini seluruh undangan diminta untuk mengenakan pakaian berwarna putih demi melambangkan kekompakan, semangat, dan komitmen tinggi untuk mewujudkan Kemendikbud sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat eselon I hingga IV, tim evaluasi Reformasi Birokrasi Kemen-PAN dan RB, tim Reformasi Birokrasi Internal Kemendikbud, dan perwakilan staf dari seluruh unit utama Kemendikbud.

Kegiatan pencanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (ZI-WBK) diawali dengan persembahan lagu-lagu nasional oleh paduan suara SMAN 39 Jakarta pemenang lomba Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Setelah dibuka oleh *Master of Ceremony* maka paduan suara memandu hadirin untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya disajikan persembahan Tarian Grambyong dari SMK N 8 Surakarta sebagai penghormatan kepada hadirin dan pemberian ucapan selamat datang.

Acara diawali dengan penyampaian laporan pembangunan Zona Integritas oleh Inspektur Jenderal Daryanto.

Dalam laporannya, Inspektur Jenderal menyampaikan bahwa sesungguhnya Kemendikbud telah banyak melakukan berbagai upaya untuk membangun Zona Integritas, tetapi belum sempat secara resmi mencanangkannya sebagai wujud komitmen kuat mencegah korupsi. Kemendikbud sudah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi, Tunas Integritas, Unit Layanan Terpadu, dan Manajemen berbasis Elektronik, serta sebagian besar aparaturnya telah menunaikan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam sambutannya menyampaikan bahwa penancangan Zona Integritas ini sudah direncanakan panjang namun baru saat ini mendapatkan kesempatan yang tepat. Belum lama ini ada pelantikan pejabat eselon III dan IV baru yang dapat menjadikan momentum penancangan ini sebagai awal untuk melakukan perbaikan menuju kebaikan.

Kemendikbud adalah salah satu hulu pencegahan korupsi, bila hulunya bersih maka pada bagian hilirnya juga pasti akan bersih. Mendikbud meminta agar hadirin tidak bersikap sebagai penonton tapi menjadi bagian dari pihak yang berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi, sedangkan penontonnya adalah rakyat yang menantikan bukti dari komitmen ini. Salah satu penyebab

korupsi adalah karena orang-orang baik itu diam atau mendiamkan. Dengan komitmen ini maka orang-orang baik itu diminta untuk mengingatkan apabila menemukan hal-hal yang menyimpang.

Mendikbud mengajak hadirin untuk memaknai integritas tidak sekedar jujur tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan kepentingan publik. Mendikbud meminta jajaran aparatur tidak melaksanakan tugas berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku tetapi juga kritis dalam menjalani ujian integritas. Mendikbud meminta Inspektur Jenderal untuk mengawal pembangunan Zona Integritas dengan terlebih dahulu menetapkan 3 unit utama yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagai percontohan Wilayah

Bebas dari Korupsi.

Seusai menyampaikan pidato, Mendikbud membacakan pernyataan deklarasi penancangan pembangunan Zona Integritas disaksikan Menteri PAN dan RB, pimpinan KPK, Ketua ORI, dan Deputi BPKP. Selanjutnya Mendikbud menandatangani piagam pembangunan penancangan Zona Integritas berikut dengan saksi-saksi.

Sebagai pengukuhan terhadap 3 unit utama yang berpredikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi juga diwujudkan dengan penandatanganan piagam oleh para pejabat eselon I disaksikan oleh Mendikbud, Menteri PAN dan RB, pimpinan KPK, Ketua ORI, dan Deputi BPKP. Penancangan ini ditandai dengan bunyi sirine yang begitu meriah diiringi dengan tabuhan karawitan SMK N 8 Surakarta.

Ketua ORI Danang

Girindrawardana dalam sambutannya menyatakan bahwa pencanangan Zona Integritas ini suasananya sangat ceria dan penuh semangat. Ketua ORI menyampaikan bahwa pengaduan tentang Kemendikbud tidak terlalu menonjol. Sebagian besar pengaduan berasal dari daerah mengenai infrastruktur, pungutan liar, dan kualitas pendidikan. Mendikbud diharapkan dapat berperan lebih banyak dalam memberikan advokasi kepada masyarakat.

Pimpinan KPK Zulkarnaen menyatakan bahwa pencanangan ini merupakan langkah berani Kemendikbud. Ia mengharapkan Kemendikbud dapat menyusun Kode Etik khusus sesuai karakter Kementerian karena banyak kegiatan yang rentan dengan gratifikasi. Di samping itu perlu sosialisasi karena banyak masyarakat yang belum memahami bahwa gratifikasi adalah salah satu tindak pidana korupsi. Harapan KPK agar pencanangan ini segera ditindaklanjuti dengan pembangunan Zona Integritas.

Deputi BPKP Binsar Panjaitan mengapresiasi kemegahan dan semangat perubahan dalam pencanangan Zona Integritas. Deputi BPKP menandakan bahwa semua hal tidak bisa lepas dari pendidikan yang merupakan titik awal. Beliau mengingatkan bahwa sudah terdapat mekanisme yang terbangun (*built in mechanism*) yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Bila SPIP sudah baik, maka ada 4



hal yang bisa diwujudkan yaitu efektivitas operasional, efisiensi, laporan keuangan yang handal, dan keamanan aset. Zona Integritas adalah modal besar dalam lingkungan pengendalian pada SPIP. Beliau menyatakan bahwa kebanggaan Inspektorat Jenderal adalah saat bisa memberikan solusi bukan pada banyaknya temuan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yudi Chrisnandi memberikan apresiasi terhadap penyajian acara pencanangan zona integritas yang banyak menampilkan seni budaya. Ia memberikan apresiasi karena pada akhirnya Kemendikbud mencanangkan Zona Integritas.

Kemendikbud adalah Kementerian ke-27 yang mencanangkan ZI-WBK. Masih ada 7 Kementerian lagi yang akan disurati untuk segera mencanangkan ZI-WBK. Ia mengapresiasi program-program

yang sudah berjalan seperti Unit Pengendalian Gratifikasi dan *E-Government*. Ia mengharapkan agar Kemendikbud terus melanjutkan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh publik.

Kegiatan Pencanangan Pembangunan ZI-WBK ditutup dengan persembahan tarian Rampak Gendang dari SMKN 10 Bandung.

Demikian liputan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kemendikbud. Kegiatan ini sangat bersejarah dan dinilai berhasil memperoleh apresiasi dari berbagai kalangan sebagai kegiatan pencanangan yang paling istimewa penyelenggaraannya dibandingkan dengan kegiatan pencanangan yang diselenggarakan oleh Kementerian lain. ■

# Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Oleh : Erna Tyas Dwi Prasetyo.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Pusat mulai menggunakan Akuntansi berbasis Akrual. Dalam pelaksanaannya, Pelaporan Keuangan berbasis akrual menggunakan aplikasi SAIBA yang telah di-launching pada tanggal 4 Maret 2015. Informasi akrual yang dikelola secara mandiri oleh satuan kerja menandakan peran APIP akan menjadi lebih penting karena penyajian Laporan Keuangan tidak cukup diyakini kewajarannya hanya dengan melihat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN setempat. Apa yang harus APIP lakukan pada saat Reviu Laporan Keuangan terhadap kondisi seperti ini? Tulisan ini akan merinci secara teknis peran APIP dalam Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual

**R**eformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja dilakukan dengan menggunakan basis akrual yang mulai diterapkan mulai tahun 2008, hal ini tercantum dalam Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan

dan belanja belum diterapkan dengan menggunakan basis akrual, digunakan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja dengan menggunakan basis kas.

Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara lingkup Pemerintah Pusat yang diwujudkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selama periode awal dilakukannya reformasi Keuangan Negara hingga waktu yang diamanatkan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Penilaian akuntabilitas atas LKPP yang salah satunya dilihat dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) pada periode tersebut adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *disclaimer*.

Melihat kondisi opini atas

LKPP tersebut ditambah dengan ketidaksiapan infrastruktur dan sumber daya akuntansi, pemerintah menunda penerapan akuntansi berbasis akrual di tahun 2008.

Namun demikian, usaha pemerintah untuk menerapkan informasi pendapatan dan belanja dengan menggunakan basis akrual mulai dilaksanakan pada tahun 2009 dengan diterbitkannya Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan. Dengan terbitnya peraturan ini, bukan berarti LKPP telah menerapkan akuntansi berbasis akrual, tetapi informasi dengan menggunakan basis akrual pada pendapatan dan belanja seperti yang diamanatkan undang-

undang telah tersedia pada Laporan Keuangan.

Setelah diterbitkannya Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009, usaha-usaha untuk melaksanakan implementasi basis akrual terus dilakukan. Persiapan dalam infrastruktur baik secara fisik, sistem dan legal terus dilakukan di samping itu usaha untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memperbaiki akuntabilitas keuangan Pemerintah Pusat salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) baik untuk level manajerial maupun level pelaksana teknis melalui tatap muka maupun *e-learning* (Mauritz, 2012).

Satu tahun sejak diterbitkannya Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009, Pemerintah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP tersebut kembali mengatur mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual yang dinyatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual

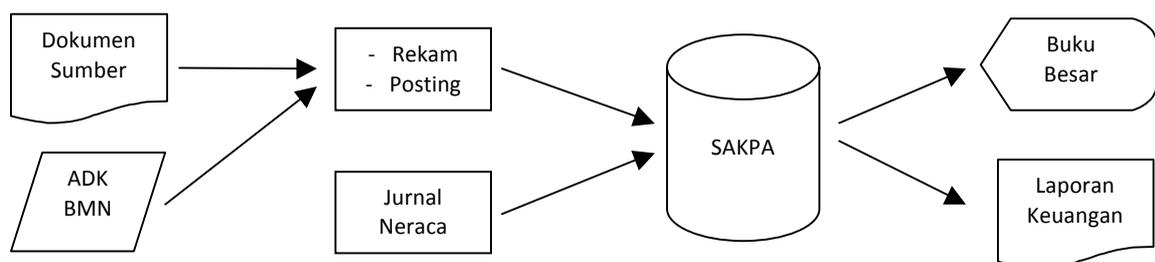
**“ Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memperbaiki akuntabilitas keuangan Pemerintah Pusat salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) baik untuk level manajerial maupun level pelaksana teknis melalui tatap muka maupun *e-learning* ”**

dilaksanakan secara bertahap dan menurut PSAP 01 lampiran 1 pada paragraf 15, akuntansi berbasis akrual diterapkan paling lama empat tahun setelah tahun anggaran 2010. Lebih tegas lagi pada PSAP 01 lampiran 2 paragraf 107, PSAP pada lampiran 2 yang merupakan PSAP untuk Akuntansi Pemerintah berbasis Kas menuju Akrual digunakan hingga tahun 2014.

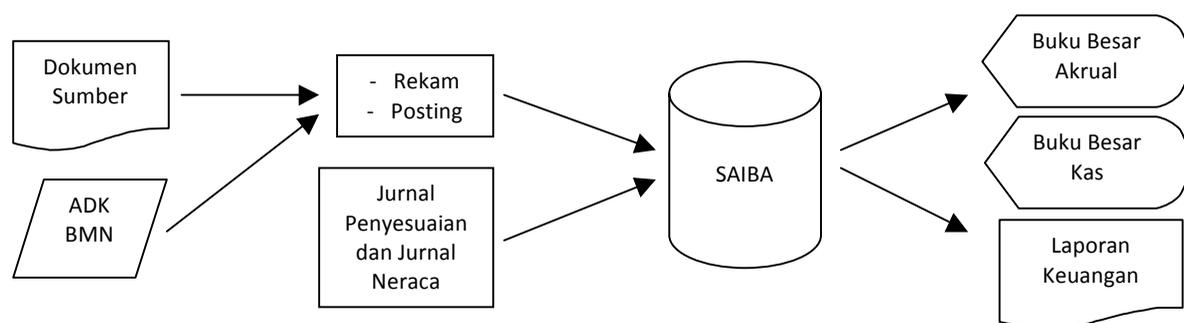
Saat ini kita telah memasuki tahun 2015 di mana Pemerintah Pusat mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual, mau tidak mau suka atau tidak suka, penerapan ini tampaknya tidak bisa ditawar lagi. Hal ini disebabkan selalu mundurnya rencana penerapan akuntansi berbasis akrual yang rencana awalnya diterapkan mulai tahun 2008, hingga akhirnya rencana ini harus dilaksanakan pada tahun 2015.

### Aplikasi SAIBA

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada tahun 2015 menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). Pada awal penerapan akuntansi berbasis akrual ini, sebenarnya direncanakan untuk menggunakan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang merupakan sistem terintegrasi untuk memproses seluruh transaksi di Kementerian/Lembaga, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban. SAKTI nantinya akan terhubung dengan sistem besar yang bernama SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang saat ini di beberapa provinsi telah diterapkan. Namun hingga saat ini, SAKTI ternyata belum siap untuk diluncurkan karena berbagai



SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran).



SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran).

kendala teknis.

Aplikasi SAIBA pada dasarnya memiliki proses bisnis yang sama dengan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). SAKPA mempunyai proses bisnis yang meliputi:

1. Perekaman dokumen sumber,
2. Penerimaan ADK BMN,
3. *Posting*,
4. Jurnal neraca pada akhir periode pelaporan,
5. Penyajian Buku Besar dan Laporan Keuangan (terdapat 2 Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran/LRA).

Adapun aplikasi SAIBA memiliki proses bisnis sebagai berikut:

1. Perekaman dokumen sumber,
2. Penerimaan ADK BMN,
3. *Posting*,
4. Jurnal Penyesuaian dan Jurnal neraca pada akhir periode pelaporan,
5. Penyajian Buku Besar (terdapat 2 Buku Besar berupa Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual) dan Laporan Keuangan (terdapat 4 Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional/LO, Laporan Perubahan Ekuitas/LPE, Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran/LRA).

## Peran APIP dalam Memastikan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

Informasi akrual yang dikelola secara mandiri oleh satuan kerja menandakan peran APIP akan menjadi lebih penting, karena penyajian Laporan Keuangan tidak cukup diyakini

kewajarannya hanya dengan melihat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN setempat. Rekonsiliasi dengan KPPN hanya dilakukan untuk akun Pendapatan-LRA dan Belanja atau untuk Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan akun-akun yang disajikan dalam

Dari gambaran kedua proses bisnis SAKPA dan SAIBA di atas, perbedaannya adalah sebagai berikut:

No.	SAKPA	SAIBA
1.	Pada akhir periode pelaporan, dilakukan <i>input</i> data pada Jurnal Neraca untuk menyesuaikan akun-akun pada Neraca	Pada akhir periode pelaporan, dilakukan <i>input</i> data pada Jurnal Penyesuaian Jurnal Neraca untuk menyesuaikan akun-akun pada Laporan Operasional dan Neraca
2.	Penyajian di Buku Besar hanya 1 jenis Buku Besar, berupa Buku Besar Kas	Penyajian di Buku Besar terdapat 2 jenis Buku Besar, berupa: a. Buku Besar Akrual yang berisi akun-akun akrual seperti Beban dan Pendapatan-LO b. Buku Besar Kas yang berisi akun-akun kas seperti Belanja dan Pendapatan-LRA
3.	Laporan yang dihasilkan: a. Neraca b. Laporan Realisasi Anggaran	Laporan yang dihasilkan: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca dihasilkan oleh Buku Besar Akrual. Laporan Realisasi Anggaran dihasilkan oleh Buku Besar Kas.
4.	Akun Ekuitas dalam Laporan Neraca dirinci menjadi: a. Ekuitas Dana Lancar b. Ekuitas Dana Investasi c. Ekuitas Dana Lainnya	Akun Ekuitas dalam Laporan Neraca tidak dirinci, perinciannya terdapat dalam Laporan Keuangan tersendiri, yakni Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca tidak dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.

Apa yang harus APIP lakukan pada saat Reviu Laporan Keuangan terhadap kondisi seperti itu? Tentunya kita harus mengetahui prinsip utama dalam akuntansi berbasis akrual, karakteristik akun yang tersaji dalam Laporan Keuangan dan menelusuri dokumen yang mendukung penyajian dalam Laporan Keuangan. Hal ini dilakukan tentunya setelah memastikan satuan kerja telah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi KPPN (BAR KPPN) untuk memastikan kewajaran penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Prinsip utama dalam akuntansi berbasis akrual adalah periodisitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 tahun 2010 disebutkan bahwa periodisitas dilakukan dengan membagi kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Posisi sumber daya yang dimiliki entitas harus tersaji dalam Laporan Keuangan berdasarkan periodisitas. Penyajian tersebut harus berdasarkan periode pelaporan yang disusun, memuat semua hak dan kewajiban entitas dalam periode pelaporan yang disusun, tidak semata-mata melihat aliran kas yang keluar

dari atau masuk ke rekening Kas Umum Negara. Berdasarkan penentuan hak dan kewajiban entitas dalam periode akuntansi yang disusun akan muncul akun-akun dalam Laporan Keuangan berupa Pendapatan Diterima di muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Beban Dibayar di muka, dan Beban yang masih Harus Dibayar.

## 1. Pendapatan Diterima di muka

Akun Pendapatan Diterima Di muka muncul ketika terdapat perjanjian dengan pihak ketiga yang melebihi satu periode akuntansi, di mana satuan kerja memberikan sejumlah barang/jasa dan menerima imbalan berupa pendapatan. Sebagai ilustrasi, suatu satker melakukan perjanjian sewa ruang untuk gerai ATM dengan pihak Bank dengan kontrak pada bulan Januari 2015, perjanjian sewa selama 3 tahun dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00. Pendapatan langsung diterima satker pada bulan Januari 2015.

Terhadap ilustrasi seperti ini, bulan Januari 2015 satker penerima pendapatan sewa dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Pendapatan Sewa	100.000.000,00	
Pendapatan Diterima di muka		100.000.000,00

Pada akhir periode akuntansi (menurut PMK 270/PMK.05/2014, penyesuaian Pendapatan Diterima di muka

dilakukan tahunan), dilakukan penyesuaian pada 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Ditagihkan ke Entitas Lain	150.000.000,00	
Pendapatan Sewa		150.000.000,00

Kedua jurnal di atas memiliki pengertian ketika menerima pendapatan di bulan Januari 2015, pendapatan langsung diakui sebesar Rp150.000.000,00 (untuk 3 tahun), padahal untuk tahun 2015, pendapatan tidak sebesar itu yang diakui, tetapi hanya Rp50.000.000,00 (Rp150.000.000,00/3 tahun), sehingga dilakukan penyesuaian dengan mendebet pendapatan dan mengkredit Pendapatan Diterima di muka sebesar Rp100.000.000,00. Pada akhirnya pendapatan yang disajikan Laporan Operasional hanya sebesar Rp50.000.000,00 dan Pendapatan Diterima di muka disajikan di Neraca pada kelompok akun Kewajiban sebesar Rp100.000.000,00.

Yang harus dilakukan oleh APIP adalah sebagai berikut:

- Memastikan keberadaan dokumen kontrak yang menghasilkan pendapatan untuk satker antara satker dan pihak ke-3,
- Mengidentifikasi kontrak yang memiliki perikatan di atas 1 periode akuntansi dan memastikan kewajaran pengungkapan Pendapatan Diterima di

muka periode akuntansi yang bersangkutan atas kontrak yang memiliki perikatan di atas 1 periode akuntansi.

## 2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima muncul ketika satuan kerja masih memiliki hak berupa pendapatan dari pihak lain, termasuk pegawai. Hal ini juga masuk ke dalam prinsip periodisitas di mana kita melakukan inventarisasi atas hak-hak satuan kerja pada satu periode akuntansi. Sebagai ilustrasi, dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi terdapat keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan. Pada akhir periode akuntansi kejadian ini akan memunculkan hak berupa pendapatan atas denda keterlambatan pekerjaan sebesar yang diatur dalam kontrak. Oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen juga diwajibkan untuk menyampaikan surat penagihan atas denda keterlambatan.

Penjurnalan saat akhir periode akuntansi (menurut PMK 270/PMK.05/2014, penyesuaian Pendapatan yang Masih Harus Diterima dilakukan tahunan) sebagai berikut:

Pendapatan yang Masih Harus Diterima	XXXX	
Pendapatan Denda		XXXX

Jurnal di atas berarti Pendapatan Denda sudah diakui walau belum terdapat penerimaan kas dan disajikan dalam Laporan Operasional. Adapun Pendapatan yang Masih Harus Diterima akan disajikan dalam Neraca pada kelompok akun Aset.

Yang harus dilakukan oleh APIP adalah mengidentifikasi hak satker dalam periode akuntansi.

Yang biasa terjadi pada satker atas akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

- Pendapatan yang belum diterima tetapi satker telah menyerahkan jasa/barang,
- Tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan yang terjadi namun belum diungkap di Laporan Keuangan.

## 3. Beban Dibayar di muka

Beban Dibayar di muka muncul ketika satuan kerja telah melakukan pembayaran atas Barang/Jasa kepada pihak ketiga tetapi Barang/Jasa tersebut belum diterima sepenuhnya. Sebagai ilustrasi, suatu satker melakukan perjanjian untuk menyewa gudang dengan pihak ke-3 pada bulan Januari 2015. Kontrak sewa tersebut berlaku selama 4 tahun senilai Rp200.000.000,00. Sewa tersebut langsung dibayarkan satker pada bulan Januari 2015.

Atas ilustrasi tersebut, pada bulan Januari 2015 satker melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Beban Sewa	200.000.000,00	
Ditagihkan ke Entitas Lainnya		200.000.000,00

Pada akhir periode akuntansi (menurut PMK 270/PMK.05/2014, penyesuaian Beban Dibayar Di muka dilakukan tahunan), dilakukan penyesuaian pada 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Beban Dibayar Di muka	150.000.000,00	
Beban Sewa		150.000.000,00

Kedua jurnal di atas memiliki pengertian ketika membayar sewa di bulan Januari 2015,

beban langsung diakui sebesar Rp200.000.000,00 (untuk 4 tahun), padahal untuk tahun 2015, beban tidak sebesar itu yang diakui, namun hanya Rp50.000.000,00 (Rp200.000.000,00/4 tahun), sehingga dilakukan penyesuaian dengan mengkredit beban dan mendebet Beban Dibayar Di muka sebesar Rp150.000.000,00. Pada akhirnya beban yang disajikan Laporan Operasional hanya sebesar Rp50.000.000,00 dan Beban Dibayar di muka disajikan di Neraca pada kelompok akun Aset sebesar Rp150.000.000,00.

Yang harus dilakukan oleh APIP adalah sebagai berikut:

- Memastikan keberadaan dokumen kontrak yang berisi pembayaran di muka oleh satker antara satker dan pihak ke-3,
- Mengidentifikasi kontrak yang memiliki perikatan di atas 1 periode akuntansi dan memastikan kewajaran pengungkapan Beban Dibayar di muka periode akuntansi yang bersangkutan atas kontrak yang memiliki perikatan di atas 1

periode akuntansi.

## 4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar muncul ketika satuan

kerja masih memiliki kewajiban berupa pembayaran kepada pihak lain, termasuk pegawai. Hal ini

juga masuk ke dalam prinsip periodisitas dimana kita melakukan inventarisasi atas kewajiban-kewajiban satuan kerja pada satu periode akuntansi. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2015 terdapat beberapa pegawai yang belum menerima rapel gaji atas kenaikan pangkat mereka per 1 Oktober 2015, selain itu satker pun masih memiliki kewajiban atas pembayaran listrik, air, dan telepon bulan Desember 2015 yang biasanya dilakukan pembayaran pada bulan setelahnya. Pada akhir periode akuntansi kejadian ini akan memunculkan kewajiban berupa Beban yang Masih Harus Dibayar.

Penjurnalan saat akhir periode akuntansi (menurut PMK 270/PMK.05/2014, penyesuaian Beban yang Masih Harus Dibayar dilakukan tahunan) sebagai berikut:

Beban Gaji-atas kekurangan pegawai	XXXX	
Beban Jasa-atas kewajiban listrik, air dan telepon	XXXX	
Beban yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Jurnal di atas berarti Beban sudah diakui walau belum terdapat pembayaran dan beban tersebut disajikan dalam Laporan Operasional, adapun Beban yang Masih Harus Dibayar akan disajikan dalam Neraca pada kelompok akun Kewajiban.

Yang harus dilakukan oleh APIP adalah mengidentifikasi kewajiban satker dalam periode akuntansi. Beberapa akun seperti listrik, air dan telepon sulit untuk ditentukan nilainya, jika tagihan

**“ Beberapa akun seperti listrik, air, dan telepon sulit untuk ditentukan nilainya. Jika tagihan belum ada ketika penyusunan Laporan Keuangan, maka nilai bisa ditentukan melalui estimasi yang bisa didapat dari rata-rata selama 1 tahun. ”**

belum ada ketika penyusunan Laporan Keuangan, maka nilai bisa ditentukan melalui estimasi yang bisa didapat dari rata-rata selama 1 tahun. Penyajian estimasi dalam Laporan Keuangan adalah hal yang lumrah, karena Laporan Keuangan yang baik adalah menyajikan nilai yang wajar, bukan yang benar. Jika nilai harus benar maka akan sulit sekali. Oleh karena itu, beberapa akun biasa dilakukan estimasi seperti Penyisihan Piutang, Penyusutan dan Persediaan.

Akun lain yang perlu diperhatikan oleh APIP adalah Penyisihan Piutang, Penghapusan Piutang, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan. Adapun untuk Penyusutan Aset dilakukan sepenuhnya oleh sistem berupa SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Aset dan Keuangan Barang Milik Negara), namun perlu dicek kesesuaian nilai penyusutan yang disajikan dalam Neraca dan Laporan BMN.

## 1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Memastikan satker telah menyusun kartu penyisihan piutang dan telah menggolongkan kualitas piutang beserta penyisihan piutang tak tertagih menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

## 2. Penghapusan Piutang

Memastikan satker telah memiliki dokumen legal terkait dengan penghapusan piutang.

## 3. Kas di Bendahara Penerimaan

Mengidentifikasi pendapatan satker yang belum disetor ke rekening Kas Umum Negara dan memastikan pendapatan melalui rekening Kas Umum Negara dengan mengecek rekening koran Bendahara Penerimaan.

## 4. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Memastikan kesesuaian antara LPJ Bendahara dengan rekening koran Bendahara dan



Berita Acara pemeriksaan kas. Setelah itu memastikan angka dalam LPJ telah diungkap dalam Laporan Keuangan seperti Kas Lainnya di Bendahara Penge-luaran, Pendapatan dan Utang kepada Pihak ke-3. Untuk saldo lain seperti pembulatan dan saldo pembukaan rekening cukup diungkap dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).

Iu mengecek kesesuaian antara BA stok opname dengan saldo di Neraca dan Laporan BMN.

## Penutup

Informasi akrual yang dikelola secara mandiri oleh satuan kerja menandakan peran APIP akan menjadi lebih penting dalam memastikan kewajaran dalam pengungkapan di Laporan

untuk Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan akun-akun yang disajikan dalam Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca tidak dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.

Dalam melakukan aktivitas reviu Laporan Keuangan maupun pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan, APIP perlu melakukan identifikasi terhadap hak dan kewajiban satuan kerja dalam periode Laporan Keuangan yang disusun, memastikan dokumen legal sebagai dasar pengungkapan saldo dalam Laporan Keuangan telah tersedia dan memastikan pengungkapan telah dilakukan secara wajar.

Dengan aktivitas reviu Laporan Keuangan maupun pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan diharapkan entitas dapat menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif Laporan Keuangan hingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari aparat pemeriksa. *Go Accrual, go WTP.* ■

Kas Lainnya di Bendahara Penge-luaran	XXXX	
Pendapatan Jasa Giro-un-tuk jasa giro rek yang belum disetor ke rek KUN		XXXX
Utang kepada pihak ke 3-untuk LS Bendahara yang belum dis-erahkan kepada yang berhak (uang makan, tunjangan, SPD, dll.)		XXXX

## 5. Persediaan

Saldo Persediaan sebenarnya dihitung secara sistem oleh SIMAK BMN dan aplikasi persediaan, namun Standar Akuntansi Peme-rintahan mengamanahkan saldo Persediaan dihitung berdasarkan stok opname, sehingga APIP per-

an Keuangan, karena penyajian Laporan Keuangan tidak cukup diyakini kewajarannya hanya dengan melihat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN setempat. Rekonsiliasi dengan KPPN hanya dilakukan untuk akun Pendapatan-LRA dan Belanja atau

# STRATEGI TIGA LINI/LAPISAN PERTAHANAN

Oleh: Agam Bayu Suryanto

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*), maka diharapkan suatu organisasi memiliki pengendalian yang memadai. Organisasi harus memiliki benteng pertahanan yang baik dan kokoh untuk mempertahankan diri dari berbagai penyimpangan. *Institute for Internal Auditor (IIA)* mengetengahkan teori atau konsep tiga lini atau lapisan pertahanan yang dipercaya dapat membantu organisasi dalam mengawal sistem manajemennya.

Tulisan ini mencoba untuk menguraikan secara ringkas tentang masing-masing dari ketiga lini atau lapisan pertahanan.

## 1. Lapisan Pertahanan Pertama

Organisasi harus memiliki manajemen yang efektif dan efisien. Organisasi harus merumuskan secara jelas tujuan-tujuan keberadaannya meliputi visi, misi, dan target yang harus dicapai. Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut, maka aktivitas organisasi akan mudah diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini juga akan meningkatkan kebersamaan anggota dan keseragaman langkah. Tata Kelola yang baik harus dipastikan dengan kejelasan tujuan organisasi dan keberlangsungan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas organisasi akan mudah diukur berdasarkan sejauh mana ketercapaian tujuan tersebut. Apabila tujuan tercapai,



maka dapat disimpulkan bahwa organisasi sudah berjalan secara efektif, demikian pula sebaliknya.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, maka organisasi dapat dipastikan akan memiliki sistem pertahanan yang baik pula. Organisasi akan terjaga dari berbagai penyimpangan prosedural yang mungkin terjadi yang apabila ditinggalkan

dapat menjerumuskan organisasi ke dalam tindakan kejahatan luar biasa yang disebut dengan korupsi. Kejelasan proses bisnis dan kualitas produk/jasa akan terjamin dengan baik bila prinsip Tata Kelola yang baik diterapkan secara konsisten.

Di samping prinsip Tata Kelola yang baik, organisasi juga bisa menerapkan sistem yang

sebenarnya sudah terkandung dalam komponen organisasi (*built in system*) yang dinamakan Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*). Sistem tersebut terdiri dari 5 komponen meliputi lingkungan pengendalian, analisis risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi.

Satuan-satuan kerja didorong untuk melakukan analisis dan menyusun peta risiko. Satuan kerja harus menerapkan manajemen risiko yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari alternatif solusi langkah-langkah pengendalian dan mitigasi risiko. Bila satuan kerja telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, maka satuan kerja akan lebih bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan peristiwa dan fenomena yang akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan organisasi.

Kemendikbud telah memprakarsai pembentukan unit-unit Satuan Pengawasan Intern pada satuan-satuan kerja di lingkungan Kemendikbud. Tugas Satuan Pengawasan Intern adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja satuan kerja dan memantau penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dengan menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik dan melaksanakan pengawasan di bawah koordinasi Satuan Pengawasan Intern, maka diharapkan benteng pertahanan satuan kerja akan semakin kuat dan membuat tata kelola organisasi menjadi efektif dan efisien.

### 2. Lapisan Pertahanan Kedua

Sesudah membentengi diri dengan pertahanan internal melalui penyelenggaraan organisasi berTata Kelola baik dan sistem pengendalian internal, maka organisasi akan dibantu oleh auditor internal yang menjadi pelapis lini pertahanan kedua.

“ Dengan menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik dan melaksanakan pengawasan di bawah koordinasi Satuan Pengawasan Intern, maka diharapkan benteng pertahanan satuan kerja akan semakin kuat dan membuat tata kelola organisasi menjadi efektif dan efisien. ”

Audit internal bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan organisasi agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks organisasi Kementerian, yang bertindak selaku auditor internal adalah Inspektorat Jenderal.

Berbeda dengan auditor eksternal, Inspektorat Jenderal selaku APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) memiliki orientasi pengawasan yang bersifat pembinaan. Inspektorat Jenderal mengidentifikasi adanya kelemahan dan memberi rekomendasi untuk mengatasinya. Hal ini diawali dengan evaluasi atas keterandalan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Tugas utama Inspektorat Jenderal adalah memastikan bahwa satuan kerja telah memiliki

pengendalian atas risiko-risiko yang akan terjadi dan menjamin bahwa pengendalian tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil analisis peta risiko satuan kerja, maka Inspektorat Jenderal akan menyusun program kerja audit. Audit Inspektorat Jenderal dilaksanakan berdasar-

kan skala prioritas risiko yang tertuang dalam peta risiko.

Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Satuan Pengawasan Intern untuk mengidentifikasi area-area yang dipandang masih lemah dan perlu segera dibenahi agar tidak menimbulkan masalah yang lebih banyak. Inspektorat Jenderal menelaah laporan pengawasan SPI dan mendalami area yang berpotensi menimbulkan masalah besar di kemudian hari bila tidak segera diatasi.

Dari hasil upaya pembenahan yang dilakukan Inspektorat Jenderal, diharapkan satuan kerja tidak akan memiliki masalah serius dan tidak ada temuan signifikan dari audit yang dilakukan auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Inspektorat Jenderal tidak memiliki otoritas



kewenangan untuk memberikan opini atas laporan keuangan sebagaimana dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

### 3. Lapisan Pertahanan Ketiga

Lapisan pertahanan ketiga atau yang terakhir adalah pengawasan oleh auditor eksternal. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki otoritas kuat untuk melakukan penilaian atas kinerja organisasi Kemendikbud. Salah satu tolok ukur parameter baik buruknya kinerja organisasi Kementerian adalah kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan. Penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah opini yang bergradasi dari tingkatan yang paling baik hingga yang paling buruk. Kementerian/Lembaga berkompetisi untuk memperoleh opini yang terbaik dan menghindari opini yang buruk demi pertanggungjawaban akuntabilitas kepada presiden dan pencitraan yang positif di mata publik.

Opini terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian yang merupakan kondisi di mana penyajian informasi dalam laporan

keuangan dinilai wajar dan telah memenuhi asas *disclosure* (keterbukaan dengan catatan dalam laporan keuangan). Di sisi lain Badan Pemeriksa Keuangan juga bisa memberikan opini yang terburuk yaitu *disclaimer* apabila banyak hal dalam penyajian informasi laporan keuangan yang tidak diyakini kewajarannya.

Kemendikbud dalam 2 tahun terakhir secara berturut-turut telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sebelum itu Kemendikbud mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian yaitu opini satu tingkat lebih rendah di bawah Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini menandakan bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Kemendikbud sudah menunjukkan kinerja yang baik.

Badan Pemeriksa Keuangan selaku benteng terakhir pertahanan organisasi akan melakukan pengawasan secara komprehensif untuk menjamin bahwa tata kelola organisasi benar-benar berjalan secara akuntabel. Apabila Satuan Pengawasan Intern dan Inspektorat Jenderal tidak dapat membendung penyimpangan

prosedur yang dilakukan, maka Badan Pemeriksa Keuangan akan menjadi unit pengawasan terakhir yang berperan dalam perbaikan tata kelola. Apabila pertahanan terakhir ini jebol juga maka langkah selanjutnya akan ditangani oleh Aparat Penegak Hukum.

### Kesimpulan

Demikianlah uraian dan penjelasan singkat tentang strategi tiga lapisan pertahanan satuan kerja Kemendikbud. Lapisan demi lapisan pertahanan membentengi satuan kerja dari berbagai bentuk modus penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Bila lapisan yang pertama sudah berhasil dijalankan dengan baik, maka organisasi akan terjamin tata kelola dan pengendaliannya. Sebaliknya bila lapisan pertahanan tersebut jebol oleh konspirasi penyimpangan jahat dari oknum yang tidak bertanggung jawab, maka lapisan kedua akan membuat perlindungan. Begitulah proses pertahanan dari tiap lapisan bekerja dalam membentengi organisasi.

Namun demikian, pada dasarnya bagaimana pun baiknya strategi tiga lapisan pertahanan ini diterapkan, semuanya akan tergantung pada manajemen organisasi. Tata Kelola yang baik merupakan faktor kunci utama yang menjadi modal dasar dalam pengendalian. Demikian pula sistem pengendalian intern yang memadai juga akan menjadi faktor pendukung yang mewujudkan manajemen organisasi yang efektif. ■

# Mengapa Audit Tidak Dapat Mendeteksi Semua Kecurangan

Oleh Helena

Auditor diharapkan untuk dapat menemukan kecurangan, Walaupun US GAAS (*United States Generally Accepted Auditing Standards*) berpendapat bahwa auditor tidak selalu dapat mendeteksi seluruh kecurangan. Ulasan di bawah ini menggambarkan pengalaman dalam banyak kasus dimana auditor dapat atau -- tidak dapat-- secara rasional mendeteksi kecurangan. Faktor2 tertentu membuat *Fraud* / kecurangan hampir mustahir ditemukan, walaupun standar audit telah diterapkan, dan faktor-faktor ini sering ada ketika auditor sedang melaksanakan tugasnya.

## Peran Auditor

Auditor diharapkan melaksanakan tugasnya secara akurat agar melindungi kepentingan umum dari kecurangan keuangan dan hal lainnya. Auditor harus paham bahwa mendeteksi kecurangan merupakan hal penting dalam audit. Seluruh lembaga terkait wajib dan sudah merupakan tugasnya untuk melaksanakan sistem pengendalian internal dan menyusun laporan keuangan yang handal dan auditor telah berperan dengan baik dalam mengauditnya sesuai standar. Walaupun bukan tugas auditor untuk menjamin bahwa laporan keuangan telah disajikan secara akurat.

Ada dua jenis audit yaitu audit keuangan yang rutin dan audit kecurangan (*Fraud* audit). Audit keuangan rutin meliputi pemeriksaan biasanya secara *sample* dari seluruh laporan keuangan. *Fraud* audit dilaksanakan lebih rinci dan mendalam pada hal khusus

atau spesifik yang bermasalah.

*Fraud* Audit biasanya dilakukan setelah adanya dugaan kecurigaan kecurangan, biasanya menghabiskan waktu lebih lama dan akibatnya menggunakan dana lebih banyak. Contohnya ada suatu perusahaan yang dengan sengaja menyusun laporan keuangan yg curang yaitu dengan jumlah aset dan keuntungan yang lebih besar dari kenyataan untuk meningkatkan harga sahamnya, karena auditor tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik maka dituntut oleh para pemegang saham.

Setelah diaudit oleh *Fraud* auditor atau forensik audit ditemukan terbukti kecurangan telah

dilakukan, seberapa jauh dilakukan dan telah berapa lama dilakukan, juga bagaimana menutupi kecurangan tersebut. Namun audit forensik membutuhkan waktu yang lebih lama, karena harus memeriksa seluruh transaksi keuangan.

Ada 4 (empat) hal penyebab sulitnya mendeteksi kecurangan:

- Adanya kebiasaan pada catatan akuntansi yang menggunakan *sampling*
  - Adanya pihak-pihak yang terlibat untuk menutupi kecurangan
  - Keengganan orang untuk mengungkap yang mereka ketahui bahwa ada kecurangan
  - Pemalsuan dan kebohongan
- Penggunaan *sampling*

“ auditor keuangan tidak dapat menemukan kecurangan disebabkan ketidakmampuannya dalam mengaudit yang disebabkan antara lain kurangnya pengetahuan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman auditor yang bersangkutan. ”



disebabkan terlalu banyaknya data uang harus diperiksa dan waktu pemeriksaan yang terbatas.

Sehingga sulit bagi auditor untuk memeriksa secara menyeluruh dan rinci sehingga *Fraud* tidak dapat terdeteksi. Dapat juga karena data yang di-*sampling* tidak termasuk yang ada penyimpangannya.

Perbedaan antara Audit keuangan dan *Fraud* Audit

1. Tujuan audit keuangan memberikan keyakinan yang masuk akal bahwa pelaksanaan keuangan dilaksanakan berdasarkan standar audit. Sedangkan *Fraud* audit mendeteksi dan menginvestigasi kecurigaan atas kecurangan yang dilakukan.
2. Sasaran audit keuangan tidak mencari persoalan yang spesifik, namun lebih mengarah pada pandangan secara menyeluruh atas laporan keuangan. Pada *Fraud* audit hanya menjurus satu atau dua sasaran saja yang menjadi target.

3. Metode audit keuangan berdasarkan *sampling* sehingga bisa salah *sampling*. Sedangkan *Fraud* Auditor menganalisa data yang dideteksi ada kecurangan secara rinci.

4. Prosedur audit keuangan dengan menganalisa laporan keuangan, observasi, cek fisik. *Fraud* Audit menggunakan juga wawancara, penelitian berkas. Semua dilaksanakan tanpa peringatan terlebih dahulu.

5. Waktu pelaksanaan audit teratur dan pasti yakni mendekati akhir tahun, sedangkan *Fraud* audit bias sewaktu-waktu bila dicurigai ada *fraud*.

6. Pelatihan audit keuangan meliputi akuntansi dan teknis audit, sedangkan pelatihan *Fraud* audit seperti CFE (*Certified Fraud Examiners*) atau pelatihan sejenisnya.

7. Penyimpangan/kecurangan yang disengaja dalam laporan keuangan jarang terjadi, biasa-

nya hanya bersifat kesalahan administrasi, sedangkan pada *Fraud* audit kecurangan merupakan makanan sehari-hari dalam pekerjaannya.

Namun dapat pula auditor keuangan tidak dapat menemukan kecurangan disebabkan ketidakmampuannya dalam mengaudit. Hal ini bisa disebabkan antara lain kurangnya pengetahuan, pelatihan, ketrampilan, dan pengalaman auditor yang bersangkutan. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain kurangnya data pendukung, perencanaan pemeriksaan yang tidak memadai, waktu audit yang sangat singkat.

Terakhir, penyebabnya adalah auditor menerima suap sehingga tidak bisa obyektif. Hal lain yang tidak kurang pentingnya adalah kurangnya independensi auditor dalam mengaudit, seperti mengaudit kantor sendiri. ■

# “PAHLAWAN TANPA TANDA JASA” ITU TELAH TIADA

Entah firasat apa yang menggiring Irjen Kemendikbud Daryanto tiba-tiba ingin bertemu dengan Sartono yang dikenal sebagai pengarang lagu Hymne Guru, beberapa jam menjelang sang legenda meninggal dunia 1 Nopember 2015.



Sartono, pencipta lagi Hymne Guru

Pertemuan dramatis di RSUD Madiun itulah, akhirnya terkuak bentuk keteladanan Sartono yang mewariskan lagu “pahlawan tanpa tanda jasa” yang masyhur itu.

Di mata Irjen Kemendikbud Daryanto, sosok sang legenda merupakan pribadi pendidik yang layak diteladani. Sartono selama hidupnya mengikhhlaskan diri untuk memilih sebagai

guru bahkan namanya tidak se-populer dengan lagu “pahlawan tanpa tanda saja,” yang sudah membumi dan akrab di telinga para siswa, pendidik dan lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Kekaguman Daryanto dan mungkin juga banyak orang lain terhadap Sartono, bertumpu pada dedikasi yang bersangkutan terhadap dunia pendidikan hingga meninggal dunia di usia 79 tahun. Kalimat “pahlawan tanpa tanda jasa” adalah pencerminan sesungguhnya dari sosok Sartono.

”*Inalillahi wainnaillahi rojiun* telah meninggal dunia Bapak Sartono pengarang lagu Hymne Guru pada Hari Minggu, 1 November 2015 pukul 12.40 WIB di RSUD Kota Madiun karena sakit, semoga arwah Almarhum diterima disisi Nya dan diampuni dosa-dosanya Amin,” tulis Daryanto melalui pesan di media sosial.

Coba simak kata demi kata dalam lirik lagu yang selalu dinyanyikan di sekolah-sekolah di setiap upacara bendera sejak era 1980-an.

*Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru  
 Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku  
 Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku  
 Sebagai prasasti terima kasihku  
 Tuk pengabdianmu  
 Engkau sebagai pelita dalam kegelapan  
 Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan  
 Engkau patriot pahlawan bangsa  
 Tanpa tanda jasa*

*Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru  
 Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku  
 Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku  
 Sebagai prasasti terima kasihku  
 Tuk pengabdianmu  
 Engkau sebagai pelita dalam kegelapan  
 Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan  
 Engkau patriot pahlawan bangsa  
 Pembangun insan cendikia*



Sepotong kalimat Hymne Guru “pahlawan tanpa tanda jasa” yang akhirnya melekat pada predikat guru, ternyata sebagai ceritera nyata sang pencipta lagu lelaki asal Madiun itu. Sejak ia mengajar musik di SMP Purna Karya Bhakti Madiun tahun 1978, hingga “pensiun” pada 2002 lalu, Sartono tetap menyandang guru honorer. Ia tak punya gaji pensiunan, karena statusnya bukan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan semasa aktif mengajar pun ia hanya menerima gaji Rp 60 ribu per bulan hingga pensiun sementara di usia rentanya sesekali mengajar musik namun mereka tetap hidup di rumah sederhana dengan mengandalkan gaji pensiun isterinya Damiyati (59) yang kebetulan juga sebagai guru.

Sartono dikenal sebagai seniman sejati yang tanpa lelah selalu membagi kemahiran bermain musik kepada siapa pun. Putera sulung dari lima bersaudara ini sebenarnya lahir dari keluarga cukup berada. Ayahnya R. Soepadi adalah Camat Lorog, Pacitan namun ketika ia berusia 7 tahun ayahnya tidak lagi menjabat camat bersamaan dengan invasi Jepang menduduki Indonesia. Kehidupan keluarga yang terseok-seok itu, memaksanya hanya sekolah sampai kelas dua di SMA Negeri 3 Surabaya kemudian bekerja di Lokananta, perusahaan rekaman dan produsen piringan hitam.

Dengan kemahirannya



*Irjen Kemendikbud Daryanto beserta Ses Ditjen Kebudayaan Nono*

bermain musik, ia sempat bergabung dengan grup musik keroncong milik TNI AU di Madiun sebagai kelompok musik tentara yang khusus menghibur tentara dari satu markas ke markas lainnya hingga sampai ke Papua. Bahkan pasca-tsunami tahun 2004, pimpinan TNI-AD sempat memintanya berada di Aceh untuk membimbing sekaligus menghibur para guru setempat dari suasana traumatis bencana itu.

Terkait penciptaan lagu Hymne Guru itu boleh dibilang tak sengaja. Ketika itu tahun 1980, Sartono tengah naik bis menuju Perhutani Nganjuk, untuk mengajar kulintang. Di perjalanan, secara tidak sengaja sempat membaca secarik koran mengenai sayembara

penciptaan lagu Hymne Guru yang diselenggarakan Depdiknas.

Hadiahnya besar sekali saat itu yakni senilai Rp 750.000. Kendala yang dihadapi bukan lantaran Sartono tidak bisa membaca not balok tetapi adalah waktu yang tersisa tinggal dua pekan untuk merampungkan lagu.

Walaupun dirinya adalah seorang guru, untuk membuat syair lagu mereka sempat menyimak lebih dalam dan detail tentang kehidupan guru sebenarnya.

Ia sempat larut ketika menyelami kehidupan guru sehingga mempengaruhi bait-bait syair yang turut berantakan sementara waktunya semakin mepet.

Usai merayakan hari pertama Hari Raya Idul Fitri, Sartono sengaja memilih untuk tidak keluar rumah yang biasanya selalu menemani isterinya silaturahmi ke orangtua dan sanak famili. Di saat kesendirian itulah Sartono lebih serius dalam proses pembuatan lagu dan syair hingga tertulis istilah “pahlawan tanpa

**“ Guru adalah juga sosok pahlawan. Namun bedanya selepas mereka berbakti tak satu pun ada tanda jasa menempel pada mereka seperti yang ada pada polisi, tentara atau abdi negara lainnya ”**

tanda jasa”. Karena keterbatasan alat musik yang ia miliki, lagu “Hymne Guru” ia ciptakan dengan bersiul sambil menorehkannya ke dalam catatan kertas.

Sartono meyakini bahwa guru adalah juga sosok pahlawan. Namun bedanya selepas mereka berbakti tak satu pun ada tanda jasa menempel pada mereka seperti yang ada pada polisi, tentara, atau abdi negara lainnya.

Di penghujung *deadline* sayembara, lagu dan syair berhasil diselesaikan dengan baik. Namun, kesulitan berikutnya adalah bagaimana cara mengirimkan materi via pos ke panitia sayembara di Jakarta, sementara kehidupan keluarganya untuk makan saja masih sangat pas-pasan. Ia akhirnya nekad membawa jas kesayangannya ke tukang loak untuk dijual me-

nutupi biaya pengiriman materi melalui pos.

Panitia sayembara akhirnya menetapkan hasil karya Sartono sebagai pemenang sayembara dengan hadiah cek tunai yang kemudian dibelikan sepeda motor guna memudahkan mengajar musik ke beberapa tempat di sekitar Madiun selain hadiah berkunjung ke Jepang untuk studi banding.

Walaupun lagu “Hymne Guru,” melambung dan populer, kehidupan sang pencipta lagu tetap saja seorang guru honorer sepanjang pengabdianya sebagai insan pendidik.

Menjelang akhir hayatnya, Sartono sempat dirawat sejak 27 Oktober lalu karena mengalami komplikasi gejala stroke, jantung, kencing manis, dan penyumbatan pembuluh darah di

otak. Bahkan menjelang dibawa ke rumah sakit, ia sempat jatuh dari ranjang tempat tidurnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan juga turut menyatakan duka yang mendalam atas wafatnya Sartono (79 tahun) pencipta lagu Hymne Guru.

“Pak Sartono dengan lagu gubahannya, Hymne Guru membuat banyak orang terinspirasi untuk tidak saja menghormati guru-guru kita, tetapi juga memuliakan para guru. Kita semua kehilangan Beliau.

Saya menyampaikan duka cita yang mendalam, semoga jasa dana mal Almarhum dicatat sebagai amal kebaikan oleh Tuhan,” ungkap Mendikbud. (Miskudin Taufik) ■



## SUYADI

# Inspektur Investigasi



Suyadi

**T**idak susah bertegur sapa dengan pria kelahiran Yogyakarta 4 Agustus 1957 ini. Terkesan mudah akrab dan selalu saja ada yang baru di setiap ujung percakapan, walaupun dia adalah seorang auditor yang selama ini identik dengan figur pengawas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Inilah seorang Drs Suyadi M.Si CfrA, sang pendekar yang kerap muncul di berbagai perhelatan seminar, temu karya, dan diskusi mengenai upaya pemerintah menegakkan zona integritas agar menjadi bagian bumi yang benar-benar bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejak mengawali kariernya tahun 1978, alumnus S-2 bidang Konsentrasi Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada, ia pernah belasan tahun bertugas sebagai pemeriksa/ auditor sebelum diangkat menjadi inspektur investigasi sejak 2012 lalu di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Suami dari ibu Sumirah dan ayah dari tiga anak itu, dalam keseharian di lingkungan keluarga dan tempat kerjanya selalu terlihat bersahaja, apa adanya dan selalu serius dalam menuntaskan tugasnya. Barangkali ini dampak dari moto hidupnya “berusaha, berdoa dan bertawakal,” yang selalu diamanahkan oleh kedua orang tuanya.

Suyadi dengan alamat e-mail [suyadi\\_noto@yahoo.co.id](mailto:suyadi_noto@yahoo.co.id)

[yahoo.co.id](mailto:suyadi_noto@yahoo.co.id) ingin berbagi pengalaman selama bekerja dengan kesan yang menurutnya negatif antara lain “jika tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai petunjuk pimpinan”.

Sedangkan kesan yang menurutnya positif antara lain “Tidak sia-sia saya bisa ikut mewarnai Itjen Kemendikbud dalam menjaga eksistensi Inspektorat Investigasi. Karena institusi ini setidaknya ikut menjaga marwah pengawasan (tidak dipandang sebelah mata oleh pihak-pihak yang tidak suka kalau korupsi itu tiada)”.

Karena itulah, ia berharap suatu hari nanti Itjen Kemendikbud menjadi organisasi yang mempunyai integritas tinggi untuk mengawal setiap kebijakan Kementerian dalam mencapai tujuannya. Sebagai penutup beliau berpesan kepada auditor muda untuk senantiasa meningkatkan

**“ Auditor muda untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya dan dalam bekerja melaksanakan tugas audit utamakan menampilkan bukti, dan bukan asumsi. ”**

kompetensinya dan dalam bekerja melaksanakan tugas audit utamakan menampilkan bukti, dan bukan asumsi. Audit adalah instrumen bagi manajemen, Oleh karena itu, pandanglah ini sebagai wahana pencapaian tujuan organisasi.

Amanah untuk menjadi Inspektur Investigasi meneruskan kepemimpinan Inspektur Investigasi sebelumnya Drs. Yanto Sugiyanto, M.Ak, pria yang selalu mengidolakan kedua orang tuanya itu terkesan sangat sibuk namun masih sempat berbagi pengalaman dan pengetahuan termasuk sebagai narasumber di berbagai forum dengan topik

pembahasan antara lain, Audit Forensik, Strategi Anti *Fraud*, Nilai-nilai Integritas, Gratifikasi, *Fraud* dalam Pendidikan dan Kebudayaan (Profil *Fraud*), Pengawasan Pendidikan dan Kebudayaan, Manajemen Resiko, dsb.

Suyadi kecil lahir dan dibesarkan di sebuah desa di pinggiran Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Putra dari pasangan Notowiharjo dan Lukiyati ini tumbuh besar di lingkungan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang eceran.

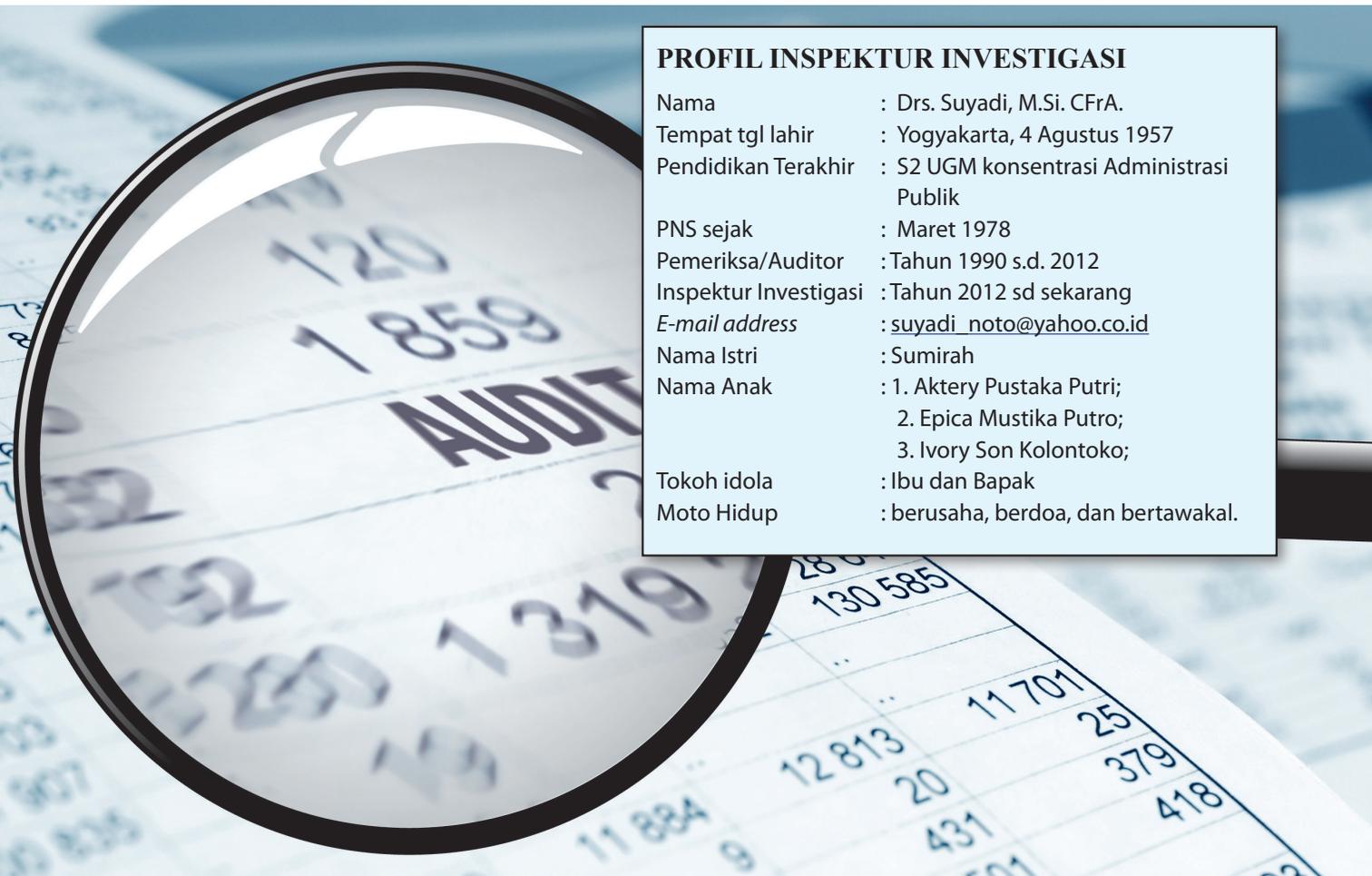
Kedua orang tua Suyadi berprofesi sebagai pedagang bumbu dapur eceran sekaligus sebagai petani gurem. Suyadi

kecil setiap hari selalu diajak ke pasar untuk ikut menjajakan barang dagangan bersama kedua orangtuanya. Aktifitas yang sangat disukai Suyadi ketika itu adalah menggembala bersama teman-temannya.

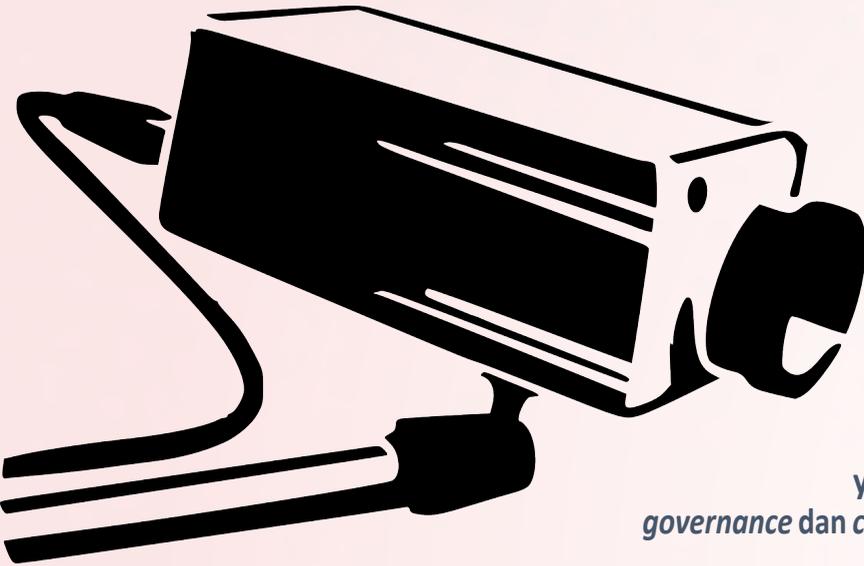
Dalam diri Suyadi kecil yang bercita-cita menjadi *amtenaar* (pegawai) sesuai harapan kedua orang tuanya, tertanam prinsip “hidup adalah perjuangan” prinsip tersebut menurutnya tidak terlepas dari didikan lingkungan masyarakat tempat dirinya dibesarkan dan kondisi alam Gunung Kidul yang terkenal tandus dan gersang. (Masrul) ■

### PROFIL INSPEKTUR INVESTIGASI

Nama	: Drs. Suyadi, M.Si. CFrA.
Tempat tgl lahir	: Yogyakarta, 4 Agustus 1957
Pendidikan Terakhir	: S2 UGM konsentrasi Administrasi Publik
PNS sejak	: Maret 1978
Pemeriksa/Auditor	: Tahun 1990 s.d. 2012
Inspektur Investigasi	: Tahun 2012 sd sekarang
<i>E-mail address</i>	: <a href="mailto:suyadi_noto@yahoo.co.id">suyadi_noto@yahoo.co.id</a>
Nama Istri	: Sumirah
Nama Anak	: 1. Aktery Pustaka Putri; 2. Epica Mustika Putro; 3. Ivory Son Kolontoko;
Tokoh idola	: Ibu dan Bapak
Moto Hidup	: berusaha, berdoa, dan bertawakal.



# “WATCHDOG...?”



Istilah “*watchdog*,” tiba-tiba menjadi akrab kembali di telinga peserta rakor sinergitas yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemendikbud di Yogyakarta pekan lalu. Istilah yang populer untuk sebutan kaum auditor itu, seakan menyentak kembali terhadap pesan reformasi yang menghendaki terwujudnya *good governance* dan *clean government* di tubuh pemerintahan.

Tapi “*watchdog*” kali ini tidak sekedar menyalak-nyalak dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, tetap berdimensi lebih luas lagi untuk mewujudkan suasana jalannya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan benar-benar bebas dari carut marut korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Melalui perhelatan akbar itu, jajaran Inspektorat jenderal yang dikomandani Daryanto saat ini nampaknya memasuki babak baru setelah disepakatinya kerjasama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pemilik prajurit-prajurit spartan yang bekerja sebagai “*watchdog*,” di seluruh Indonesia. Ini bermakna bahwa Itjen Kemendikbud memiliki banyak teman dalam menunaikan tugas untuk mewujudkan zona integritas yang bebas dari praktik KKN itu.

Suka atau tidak suka, sebagai pemangku amanah APIP yang selama ini bertindak selaku “*watchdog*,” selalu memancing asumsi seakan sosok yang kurang disukai oleh pihak-pihak

yang diperiksa. Ini sepotong cerita dari konsekuensi logis sebagai “*watchdog*,” dari sudut pandang mereka berniat merugikan negara.

Tetapi sebaliknya, kehadiran APIP di-mata publik yang mendambakan negara ini benar-benar terbebas dari jeratan KKN malah memberikan apresiasi luar biasa. APIP sebagai “*watchdog*,” belakangan ini sudah memiliki multiperan yang tidak hanya menyalak-nyalak bagi pesakitan tetapi juga sebagai mitra dan sahabat terdekat untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

APIP sebagai “*watchdog*,” dalam wajah lain adalah konsultan untuk mencari solusi dari carut-marut terjadinya tindak KKN. APIP dari wajah yang lain adalah juga berperan dalam kancah *quality assurance* yang setiap saat berkewajiban melakukan bimbingan dan pendampingan terhadap jalannya proses manajemen termasuk memberi peringatan dini terhadap implikasi munculnya resiko yang dapat mencederai pencapaian tujuan organisasi.

Di lingkungan Itjen Kemendikbud, peran

## “Kumpulan ”*watchdog*,” secara nyata memberi andil dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.”

APIP sebagai “*watchdog*,” kemudian sebagai konsultan dan sebagai pendamping sudah dinilai sukses dengan ditandai pemberian anugerah predikat WTP dari BPK dalam dua tahun berturut-turut. Tetapi Irjen Daryanto membuka ruang baru terhadap peran APIP yang lebih luas, lebih menantang, dan lebih memberikan aura positif dalam hal tata kelola keuangan negara yang dipercayakan pemerintah terhadap pemangku pendidikan di tanah air yaitu sebagai agen perubahan yang tidak hanya berpikir, bersikap dan bertindak selaku auditor keuangan dan ketaatan tetapi turut memberi kontribusi terhadap perbaikan kualitas kinerja.

Mungkin atas alasan itulah, Mendikbud Anies Baswedan dan kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam perhelatan akbar tersebut secara bersahaja memberikan apresiasi khusus kepada Itjen Kemendikbud, karena bagaimana pun di pundak Itjen Kemendikbud dan APIP lain di lingkungan BPKP dan Inspektorat provinsi, amanah negara dalam tata keuangan dan penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai saran optimal. Kedua petinggi itu pula menyebut bahwa dengan cara itulah, kumpulan “*watchdog*,” secara nyata memberi andil dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pujian tersebut bukan tanpa dasar, karena melalui inovasi Itjen Kemendikbud itulah kaum “*watchdog*,” seakan memperoleh roh baru untuk mempertebal tekad mengawasi peruntukan dana pendidikan yang bersumber dari 20 persen alokasi dana APBN.

Ini kerja besar dan Itjen Kemendikbud bersama BPKP sudah memulai untuk siap dijadikan model bagi kementerian dan lembaga

pemerintah lainnya.

Predikat *Watchdog* (anjing pengawas) bila kalap akan bablas menjadi *bloodhound* (anjing penggigit), dan julukan memilukan ini, kini mulai ditinggalkan dan diluruskan dengan julukan

*Catalyst* (katalisator, menyatu tanpa larut / berubah sifat) yang dampaknya lebih bersahabat dengan *auditee*. Induk *catalyst* ini lebih dekat dengan peran *consulting* ketimbang “*assurance*”. Praktik pendampingan yang kini banyak diminati *auditee* adalah bentuk nyata peran “*consulting*,” Nah...perkembangan paling anyar atas peran *consulting* ini, sudah bergeser pula dan kini difokuskan pada kegiatan “*Advisory*,” dan “*Insight*”.

Kedua istilah terakhir ini (auditor yang melakukan fungsi *advisory* dan *insight*) menabuh genderang bahwa sekarang, internal auditor tidak perlu ragu-ragu lagi dengan prinsip independensinya. Peran *consulting* yang acap kali membuat auditor ragu akan independensinya, kini terobati dan terbayar sudah dengan peran baru sebagai *advisory* dan *insight*, yang secara harfiah akan memposisikan auditor tetap sebagai pihak luar (meskipun secara organisatoris berjudul internal auditor), dan secara tegas telah membebaskan auditor dari tanggung jawab pelaksanaan yang dilakukan oleh manajemen. Nah..., ke mana dirimu *Watchdog*? Maaf, *Goodbye*...!!! (Tim Redaksi) ■



# RADIO ITJEN GOES TO SCHOOL



Daftarkan  
kegiatan ekstrakurikuler  
sekolah kalian  
& kami siarkan

## Syarat & Ketentuan:

- Like fanpage Radio Itjen di [www.facebook.com/radiosenayan](http://www.facebook.com/radiosenayan)
- Follow twitter Radio Itjen di [www://twitter.com/radioltjen](http://www://twitter.com/radioltjen)
- Kirim foto dan informasi kegiatan menarik di sekolah mu ke **facebook** Radio Itjen!
- Sekolah dengan **like terbanyak** akan kami liput dan siarkan di Radio Itjen kemendikbud



Mitra  
Informasi Pengawasan  
Pendidikan &  
Kebudayaan

Come to join us :

- \* [www.radio.itjen.kemdikbud.go.id](http://www.radio.itjen.kemdikbud.go.id)
- \* Aplikasi Tune in to Playstore
- \* Aplikasi Radio Itjen